



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT



Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Tahun 2022

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Rantau
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71111



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas RahmatNya jualah kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang menjabarkan pencapaian serta hambatan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar itulah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin yang memuat Penjelasan Umum Organisasi, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini kiranya dapat dijadikan acuan penilaian atas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan selanjutnya mengharapkan masukan dan kritik atas kelemahan dan kekurangan yang ada.

Rantau, 28 Februari 2023

Inspektur Kabupaten

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		hal
Daftar Isi		i
BAB I PENDAHULUAN		ii
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI		1
B. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		1
C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2020		3
D. SISTEMATIKA LAPORAN		3
BAB II PERENCANAAN KINERJA		4
A. RENCANA STRATEGI		6
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA		6
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		7
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT		12
KABUPATEN TAPIN		
A. PENGUKURAN KINERJA		14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA		22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN		58
BAB IV P E N U T U P		59
A. SIMPULAN		59
B. SARAN		60

Lampiran – lampiran :

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah;



3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin terdiri dari:

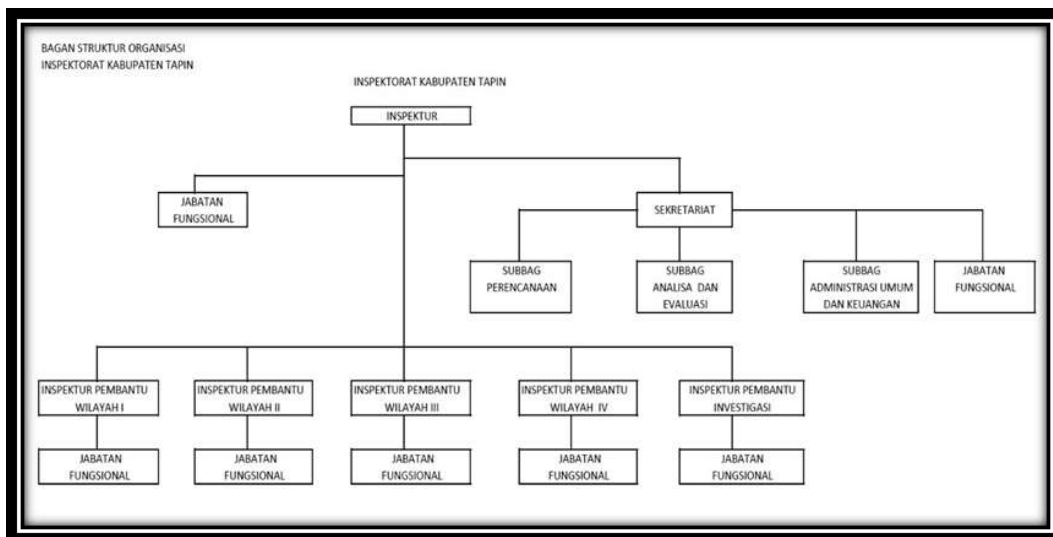
1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisa dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
3. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
5. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektorat Pembantu Investigasi; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah PNS Menurut Tingkat Jabatan/ Eselonering Keadaan Desember 2022

No.	Eselon	Jumlah (PNS)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	3
4.	JabatanP2UPD	10
5.	Jabatan Fungsional Auditor	16
6.	Non Eselon/staf/Pelaksana	4
JML		40



Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah:

1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik
3. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan Inspektorat
4. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat



implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berikut dapat dilihat hasil tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2021:

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1	Pengukuran kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti Pengukuran Kinerja melalui aplikasi esakip V2
2	Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Akan dilaksanakan evaluasi terhadap laporan kinerja dan budaya kinerja organisasi
3	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Akan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Akan membangun sistem informasi evaluasi akuntabilitas kinerja

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Inspektorat serta tindaklanjut hasil evaluasi APIP TA 2021



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Tapin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana jangka panjang lima tahunan, serta rencana jangka pendek setiap tahun. Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tapin

Tujuan:

“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Dengan indikator Tujuan:

1. Nilai SAKIP (Predikat)
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan (Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi dan Monitoring)	Menetapkan kebijakan peraturan prosedur dan mengawasi pelaksanaannya



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan pemahaman SKPD tentang akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Menerapkan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara konsisten
	Peningkatan profesionalisme APIP terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Memberdayakan APIP
Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pengoptimalan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinegritas dengan instansi terkait	Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat daerah, provinsi mau pun pusat
	Meningkatkan pemahaman SKPD tentang integritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat daerah provinsi mau pun pusat
	Peningkatan profesionalisme APIP terhadap integritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Memberdayakan APIP

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tapin. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Kabupaten Tapin dalam pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.



Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 IKU Inspektorat

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin
	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil
	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat
Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK
	Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi

Kemudian penjelasan mengenai makna indikator dan cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Makna Indikator dan cara perhitungannya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Opini WTP yang diberikan Audit Eksternal terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	LHP Audit Eksternal
	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil	Jumlah entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil dibagi jumlah entitas yang diperiksa dikali 100%	LHP Audit Eksternal



	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB	LHE SAKIP MENPANRB
	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP
	Niali Kapabilitas APIP Inspektorat	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP
Meningkatnya Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Nilai capaian MCP KPK	Hasil Penilaian MCP KPK
	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Hasil Penilaian TPN MENPANRB
	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Hasil Evaluasi RB Menpan RB	LHE RB MENPANRB

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.



Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Esselon II	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP
			Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%	95,55%
			Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	BB	B
			Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3	Level 3
		Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2
			Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95	85,18
			Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	11	0
Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	2.3	1.47			
No	Esselon	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Esselon III Sekretaris	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai kebijakan pengawasan	Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko	100 %	100 %
		Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten	Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat	100 %	100 %
		Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektorat Kabupaten Tapin	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran	100 %	100 %
		Meningkatnya Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3	Level3	Level3
2	Esselon III Irbn I	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	37,5%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakip skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	100%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Money BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Money BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa	100%	100%



3	Eselon III Irbab II	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	29,62%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	100%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%
4	Eselon III Irbab III	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	66.66%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%
5	Eselon III Irbab IV	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	57,14%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	66.66%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%
6	Eselon III Irbab Investigasi	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi	100%	77.77%
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu HPS dan Probit Audit)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu HPS dan Probit Audit	100%	100%
		Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD	Jumlah SKPD yang mengusul predikat WBK hingga TPN	3 SKPD	1 SKPD



		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD	Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti	100%		
		Meningkatnya nilai penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Persentase capaian area penguatan pengawasan	100%	59%	
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi	Persentase hasil evaluasi area pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	100%	77.77%	
No	Eselon	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	
1	Eselon IV Kasubag Analisa dan Evaluasi	Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan	Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	100 %	100 %	
			Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu	100 %	100 %	
			Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko	100 %	100 %	
			Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100 %	100 %	
			Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama	100 %	100 %	
2	Eselon IV Kasubag Perencanaan	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan	Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras	100%	100%	
			Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat	100%	100%	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%	100%	
			Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin	Minimal 70	71.35	
3	Eselon IV Kasubag Adm Umum & Keuangan	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100 %	100 %	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
			Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu	100 %	100 %
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Umum	Indeks kepuasan pelayanan	80	80,3
			Meningkatnya Jumlah pernyataan <i>Self assesment</i> Kapabilitas APIP yang terisi	Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat	100 %	100 %

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Program dan Anggaran

Program	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.892.217.011



Program	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.852.381.300
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	361.808.100
Jumlah	13.106.406.411

Tabel. 2.5 Matrik Perencanaan Kinerja Inspektorat Periode 2018-2023

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil				100%	100%	100%
3	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Minimal B	Minimal B	Minimal B	Minimal B	Minimal BB	Minimal BB
4	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	3	3	3	3	3	4
5	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	2	2	2	3	3	4
6	Capaian Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK			85	90	95	100
7	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK				10	11	12
8	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi				2	2.3	2.5



BAB III

**AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN**

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Inspektorat Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun keempat Renstra Inspektorat 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 74.47% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	100%
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%	95.55%	95.55%
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	BB	B	80%
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3	Level 3	100%
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	66.66%
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95	85,18	89,66%
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	11	0	0%
		Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	2.3	1.47	63.91%



Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program dan kegiatan penunjang sasaran strategis sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.805.982.200	2.852.381.300	59.35
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.838.392.200	2.125.888.500	55.38
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	967.590.000	726.492.800	75.08
2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	857.752.300	361.808.100	42.18
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	57.812.100	18.794.500	32.51
	Pendampingan dan Asistensi	799.940.200	343.013.600	42.88

Kinerja jenjang Eselon III

Sekretaris

No	Eselon	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon III Sekretaris	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB	BB	BB	100 %
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai kebijakan pengawasan	Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten	Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektorat Kabupaten Tapin	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3	Level3	Level3	100 %



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tapin telah mendapatkan nilai BB dengan nilai 71,35, kedepannya Inspektorat Kabupaten Tapin akan terus berupaya meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin.
2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin sudah berupaya membuat PKPT berbasis resiko yang kemudian di realisasikan dengan melaksanakan audit kinerja sebagai bagian dari penilaian elemen peningkatan kapabilitas APIP.
3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2022 seluruh jabatan fungsional pengawas Inspektorat telah memiliki sertifikat sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran pada tahun 2022 seluruh layanan pengurusan administrasi perkantoran telah terpenuhi.
5. Sasaran kelima dengan indikator Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3 pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan hasil level 3 yang kemudian dilanjutkan penilaian oleh BPKP perwakilan Kalsel.

Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV

No	Esselon	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Esselon III Irbn I	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	37,5%	37,5%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%		
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I	100%	N/A	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa	Persentase capaian Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%



2	Esselon III Irbab II	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	29,62%	29,62%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sapk minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%		
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II	100%	N/A	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%
3	Esselon III Irbab III	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	75%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sapk minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	66.66%	66.66%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%		
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III	100%	N/A	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu RPKD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu RPKD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%
4	Esselon III Irbab IV	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	57,14%	57,14%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sapk minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	66.66%	66.66%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%		
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV	100%	N/A	N/A
		Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV, hasil rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebagai berikut



Inspektur Pembantu Wilayah I 37,5%, Inspektur Pembantu Wilayah II 29,62%, Inspektur Pembantu Wilayah III 75% dan Inspektur Pembantu Wilayah IV 57,14%.

2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase predikat sakip skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV pada tahun 2022 inspektorat telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan hasil sebanyak 12 SKPD sample dimana berdasarkan hasil evaluasi ada 2 SKPD yang mendapat predikat B dan 10 SKPD mendapatkan predikat BB diman 2 SKPD yang mendapat predikat B di Inspektorat pembantu wilayah III dan IV.
3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV, untuk hasil evaluasi 2021 Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV belum melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV, untuk tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tapin telah melaksanakan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi, karena untuk tahun 2022 menggunakan format baru penilaian SPIP sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran menggunakan indikator ini.
5. Sasaran kelima dengan indikator Persentase capaian Area Intervensi MCP KPK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV, pada tahun 2022 seluruh kegiatan pencapaian MCP KPK telah dilaksanakan.

Inspektur Pembantu Investigasi

No	Essselon	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Esselon III Irbn Investigasi	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi	100%	77.77%	77.77%
Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu HPS dan Probit Audit)		Persentase capaian Area Intervensi Reviu HPS dan Probit Audit	100%	100%	100%	
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD		Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN	3 SKPD	1 SKPD	33.33%	
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD		Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti	100%			
Meningkatnya nilai penguatan pengawasan reformasi birokrasi		Persentase capaian area penguatan pengawasan	100%	59%	59%	



	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi	Persentase hasil evaluasi area pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	100%	77.77%	77.77%
--	--	--	------	--------	--------

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi pada tahun 2022 hasil rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 77.77%
2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase capaian Area Intervensi Reviu HPS dan Probit Audit pada tahun 2022 Inspektur Pembantu Investigasi telah melaksanakan Reviu HPS dan Probit Audit.
3. Sasaran ketiga dengan indikator Jumlah SKPD yang mengusul predikat WBK hingga TPN, pada tahun 2022 hanya 1 SKPD yang berhasil mencapai Tim Penilai Nasional.
4. Sasaran keempat dengan indikator Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti, pada tahun 2022 Inspektur Pembantu Investigasi belum melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Zona Integritas.
5. Sasaran kelima dengan indikator Persentase capaian area penguatan pengawasan, pada tahun 2022 hasil evaluasi mandiri terhadap area penguatan pengawasan sebesar 59%.
6. Sasaran keenam dengan indikator Persentase hasil evaluasi area pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti, berdasarkan hasil tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi sebanyak 77.77% telah ditindaklanjuti.

Kasubag Analisa dan Evaluasi

No	Esseelon	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Esseelon IV Kasubag Analisa dan Evaluasi	Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan	Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
			Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko	100 %	100 %	100 %
			Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100 %	100 %	100 %
			Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama	100 %	100 %	100 %



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan didapatkan hasil:

1. Indikator Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan, pada tahun 2022 telah dibuat ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai dengan PermenpanRB No 42 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah.
2. Indikator Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu, laporan tindak lanjut hasil pengawasan dibuat berdasarkan surat tugas tim yang bersangkutan dengan capaian 100%
3. Indikator Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko, kasubag Analisa dan Evaluasi telah memperhitungkan faktor risiko dalam PKPT sebagai keperluan penilaian kapabilitas APIP dan pelaksanaan audit kinerja.
4. Indikator Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum, proses pembentukan produk hukum telah mengikuti prosedur baik internal maupun dari bagian hukum setda Kabupaten Tapin.
5. Indikator Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama, kasubag Analisa dan Evaluasi telah melaksanakan kerjasama pengawasan dengan APH bersama Irban Investigasi dan koordinasi baik dengan BPK, BPKP dan APIP Provinsi masalah pengawasan maupun jadwal kegiatan pengawasan.

Kasubag Perencanaan

No	Esseelon	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Esselon IV Kasubag Perencanaan	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan	Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras	100%	100%	100%
			Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat	100%	100%	100%
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%	100%	100%
			Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin	Minimal 70	71.35	101.92%



Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan didapatkan hasil:

1. Indikator Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras, berdasarkan hasil evaluasi saking belum ada perubahan terhadap indikator kinerja.
2. Indikator Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat, konten dokumen informasi publik telah di upload di website Inspektorat.
3. Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu, laporan monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan
4. Indikator Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin, Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat mendapat predikat BB dengan nilai 71.35 inspektorat akan terus berupaya meningkatkan nilai akuntabilitas saking kedepan.

Kasubag Adm Umum & Keuangan

No	Essselon	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Essselon IV Kasubag Adm Umum & Keuangan	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Umum	Indeks kepuasan pelayanan	80	80,3	100,37%
		Meningkatnya Jumlah pernyataan <i>Self assesment</i> Kapabilitas APIP yang terisi	Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pencapaian kinerja didapatkan hasil:

1. Sasaran pertama dengan indikator Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN, ASN inspektorat mengikuti peningkatan kapasitas sesuai jadwal diklat yang sudah direncanakan.
2. Sasaran kedua dengan indikator Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar, laporan keuangan telah disampaikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sasaran ketiga dengan indikator Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu, laporan BMD telah disampaikan sesuai waktu yang ditentukan.



- Sasaran keempat dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan, pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei didapatkan nilai 80,3
- Sasaran kelima dengan indikator Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat, pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan hasil level 3.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	100%	WTP
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	73.58%	100%	95.55%	95.55%	100%
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	B	BB	B	80%	BB
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3	Level 3	Level 3	100%	4
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2	Level 3	Level 2	66.66%	4

Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin

Opini Audit Eksternal yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin. Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
- Efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;



- 2) **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP).** Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- 4) **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),** Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin oleh BPK RI.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 13.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapin telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan sertasistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan



terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 8 (delapan) tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2021.

Analisis ketercapaian sasaran inspektorat:



Dengan diberikannya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin TA 2021 maka telah tercapailah target WTP yang telah ditentukan



Realiasi kinerja sejak tahun 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil meraih predikat opini WTP sesuai dengan target Renstra Inspektorat



Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat mempertahankan predikat opini WTP

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat sehingga dapat tercapainya target Opini WTP dari BPK adalah dengan cara melakukan reuiu RPJMD telah sesuai dengan kaidah perencanaan, Reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, KUA, PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta reuiu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu juga Inspektorat melakukan pendampingan terhadap tim BPK yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan membantu dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama yakni permasalahan pengelolaan pajak, khususnya pajak barang dan jasa, diharapkan agar tidak terjadi lagi temuan yang berulang dari tahun ketahun.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal diantaranya sub kegiatan pengawasan keuangan, reuiu laporan keuangan, pengawasan desa, monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP



serta kegiatan pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan seluruh entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 100% raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemda

Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil

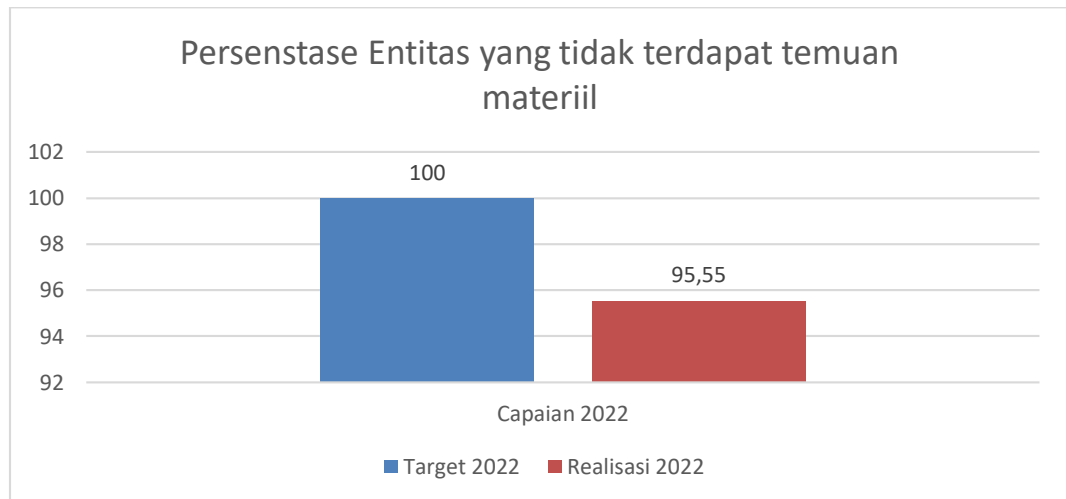
Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Pertimbangan Pemeriksa tentang materialitas merupakan pertimbangan yang bersifat profesional (*professional judgement*) dan dipengaruhi oleh persepsi yang wajar tentang keandalan dan kepercayaan atas laporan keuangan yang diperiksa. Materialitas mengandung unsur subjektivitas tergantung pada sudut pandang, waktu, dan kondisi pihak yang berkepentingan.

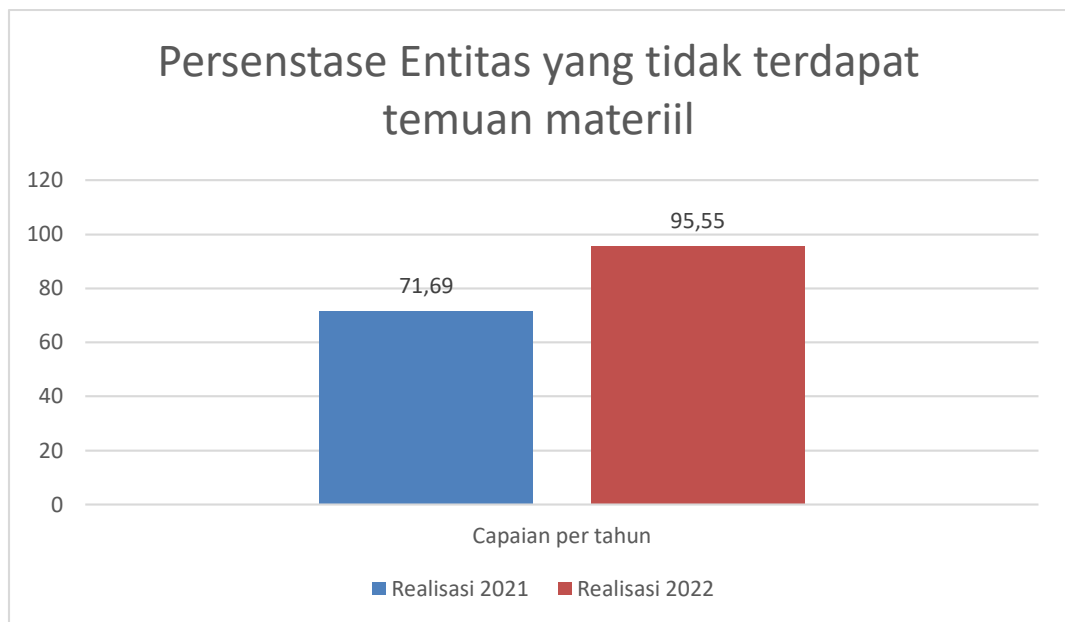


Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam Pemeriksaan Keuangan. Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu *reasonable assurance* (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

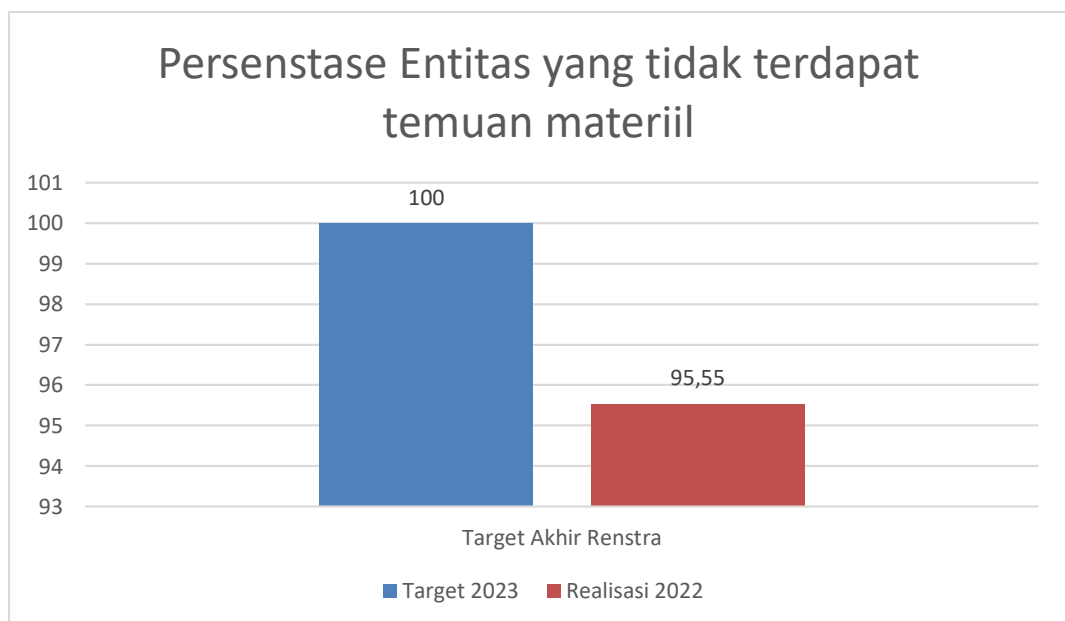
Tahun 2022, Inspektorat mendapatkan capaian kinerja sebesar 95,55% capaian tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan) Nomor 13.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan bahawa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyajikan secara wajar (semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil laporan tersebut sebanyak 2 SKPD mendapatkan temuan penyetoran sehingga terdapat 43 SKPD yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil dari total 45 SKPD yang diperiksa.



Berdasarkan target 100% yang telah ditentukan capaian indikator ini adalah 95,55% dengan penilaian realisasi kinerja sangat baik



Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 71,69% dan tahun 2022 adalah sebesar 95,55 sehingga ada kenaikan sebesar 23,86% (untuk tahun 2018-2020 tidak dilakukan pengukuran karena indikator baru)



Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan berhasil dicapai.

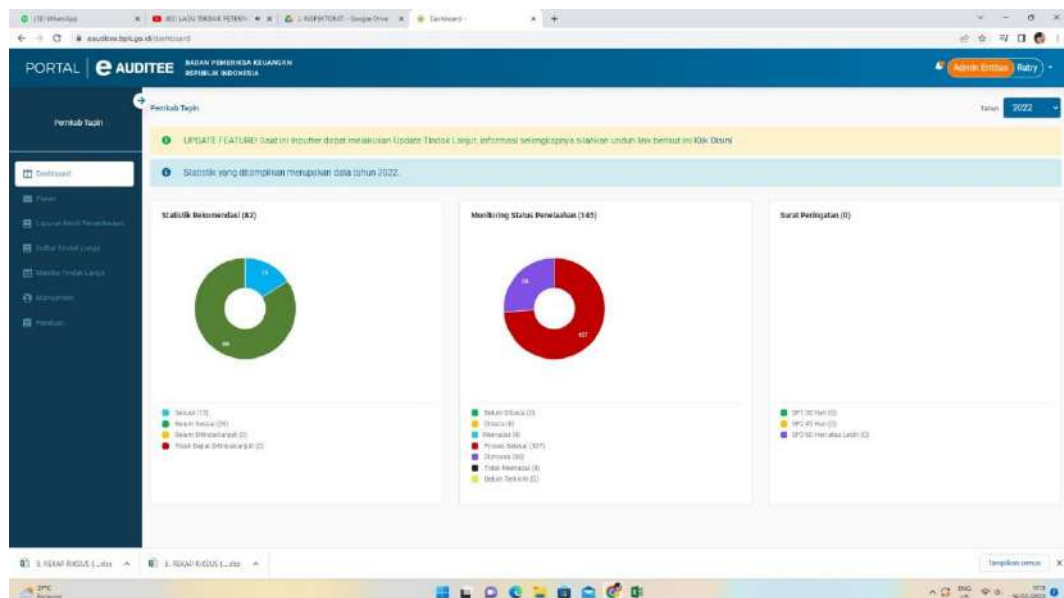
Faktor penghambat yang menjadikan target kinerja ini adalah masih belum idealnya jumlah SDM pengawas di Inspektorat Kabupaten Tapin dibanding dengan cakupan wilayah pengawasan sehingga mengakibatkan tidak dapat melakukan pengawasan yang optimal terhadap seluruh unit kerja yang ada di Kabupaten Tapin. Upaya yang telah dilakukan inspektorat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tiap unit kerja telah bersih dari



penyimpangan pengelolaan keuangan yang material adalah melakukan pemeriksaan dengan pola Pengawasan berdasarkan Perencanaan Berbasis Risiko sehingga pengawasan fokus terhadap entitas yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan, selain itu Inspektorat Kabupaten Tapin juga melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mendapatkan data yang akurat Instrumen pendukung capaian kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI. SIPTL merupakan aplikasi BPK Prov Kalimantan Selatan yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK Prov Kalimantan Selatan. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.



Sumber: <https://eauditee.bpk.go.id/>

Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

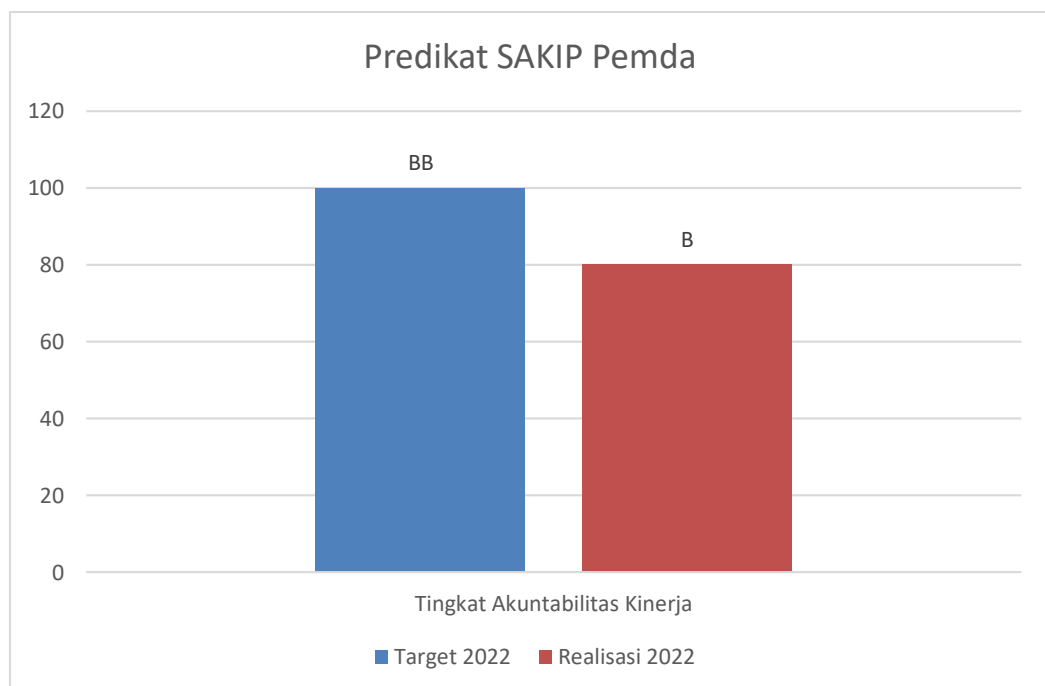


Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

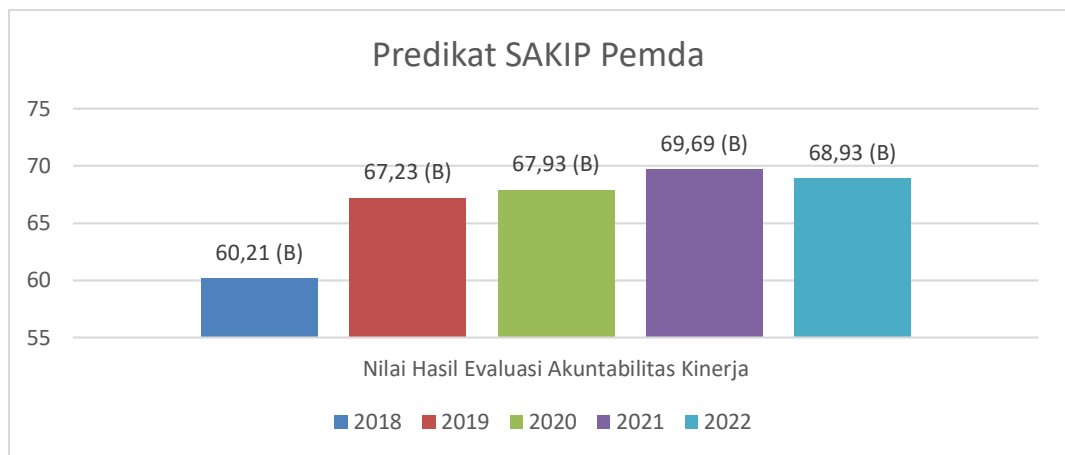
Realisasi Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan NomorB/1164/AA.05/2022 menunjukkan nilai **68,93** dengan kategori nilai **“B”** dengan interpretasi **“Baik”**.

Perkembangan Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019-2020 sebagai berikut:

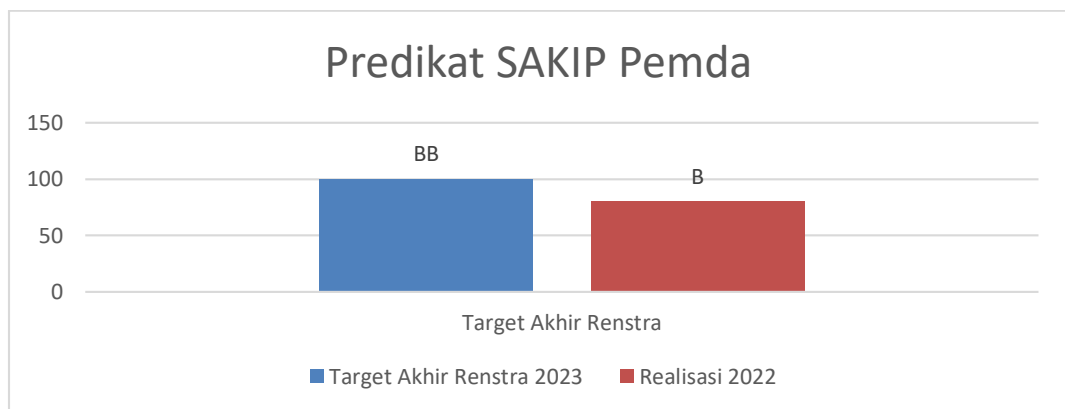
	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,45
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,43
d.	Evaluasi Internal	25	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,93
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B



Berdasarkan target BB yang telah ditentukan realisasi hasil penilaian MenpanRB adalah B capaian indikator ini adalah 80% dengan penilaian realisasi kinerja Tinggi



Jika melihat realisasi nilai hasil evaluasi SAKIP Kab Tapin setiap tahun mengalami kenaikan, untuk nilai 2022 ada penurunan sebesar 0,76 poin dari nilai 2021. Hal ini dipengaruhi perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian evaluasi (PermenpanRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)



Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan berhasil tercapai

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Belum optimalnya pemahaman SAKIP di masing-masing perangkat daerah
- Kinerja dan indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)
- Proses penjenjangan pada PK belum diimplementasikan ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP)
- Pembuatan *cross cutting* program lintas perangkat daerah belum optimal
- Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban analisis capaian kinerja tidak menggambarkan secara komprehensif penyebab keberhasilan/kegagalan.



f. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dapat memberikan tindak lanjut perbaikan kondisi penerapan SAKIP perangkat daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Bupati s.d. pegawai termasuk distribusi target kerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.
- b. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimtek dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- c. Peningkatan kualitas Evaluator APIP melalui Bimtek dan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP baik itu dari Itprov dan KemenpanRB;
- d. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja pertriwulan;
- e. Memperkuat sinergi Bagian Organisasi, Bappelitbang dan Inspektorat serta stakeholder SKPD.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan Reviu laporan kinerja.

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin adalah aplikasi E-SAKIP (esakip.tapinkab.go.id).



Sumber: esakip.tapinkab.go.id



PENYERAHAN HASIL EVALUASI SAKIP & RB 2022		
Provinsi Kalimantan Selatan	SAKIP	RB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A	B
Kabupaten Balangan	B	B
Kabupaten Banjar	B	CC
Kabupaten Barito Kuala	B	CC
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A	BB
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	B	CC
Kabupaten Hulu Sungai Utara	B	CC

PENYERAHAN HASIL EVALUASI SAKIP & RB 2022		
Provinsi Kalimantan Selatan	SAKIP	RB
Kabupaten Kotabaru	B	CC
Kabupaten Tabalong	B	CC
Kabupaten Tanah Bumbu	B	CC
Kabupaten Tanah Laut	B	B
Kabupaten Tapin	B	CC
Kota Banjarbaru	B	B
Kota Banjarmasin	BB	B

Berdasarkan hasil evaluasi Sakip dan RB tahun 2022, terdapat 1 pemerintah provinsi berpredikat A, 1 pemerintah kabupaten/kota berpredikat A, 1 pemerintah kabupaten/kota berpredikat BB, dan 11 pemerintah kabupaten/kota berpredikat B.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 11 pemerintah kabupaten/kota berpredikat B

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan



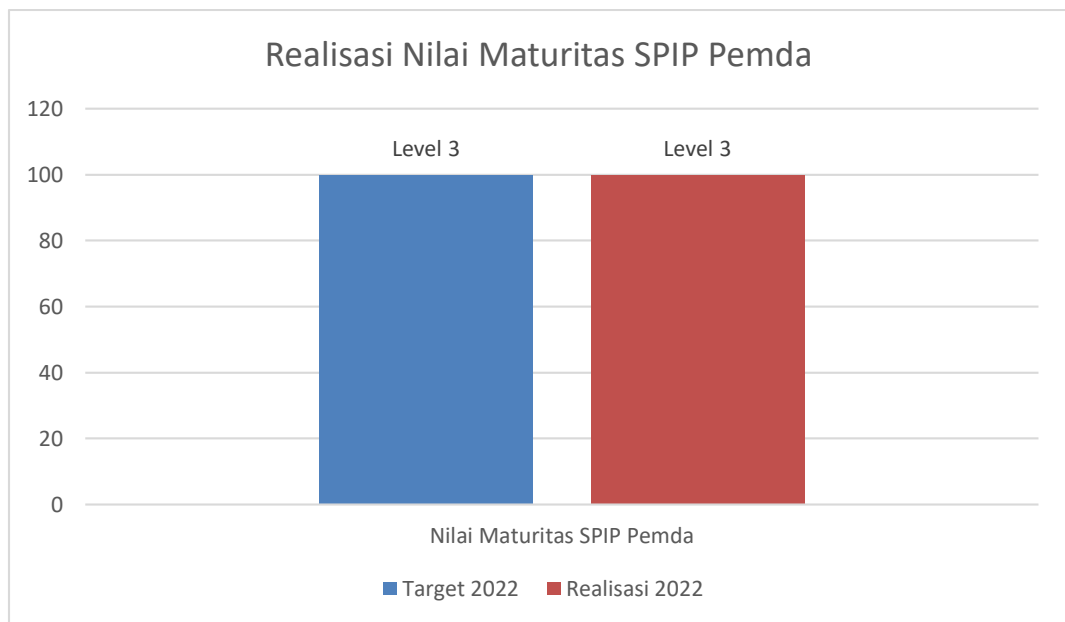
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D, kerangka maturitas SPIP terdiri dari lima level yaitu:

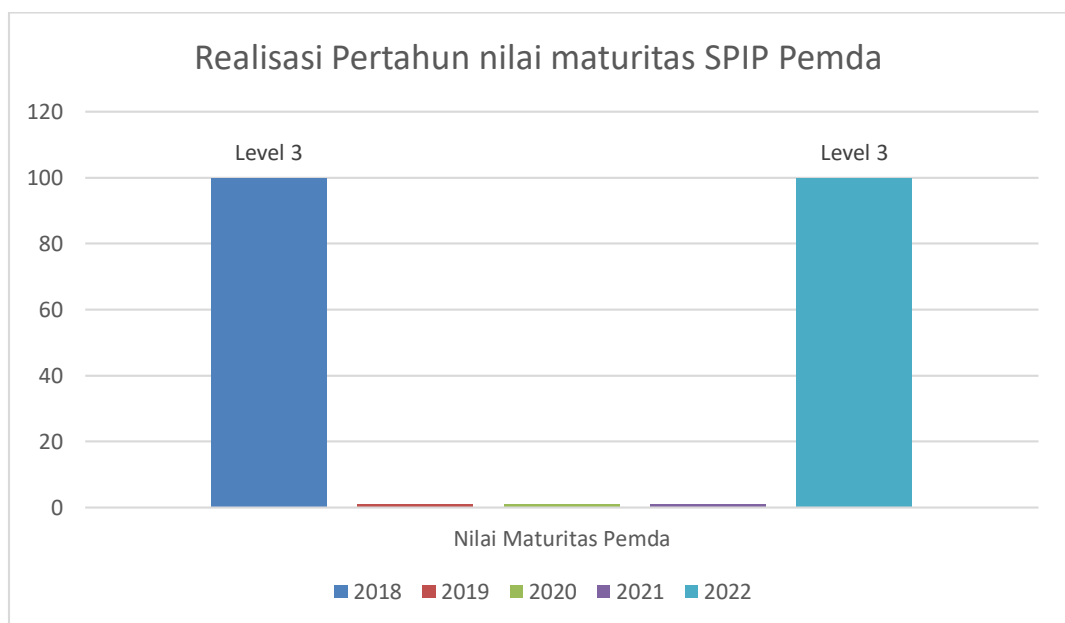
Level	Tingkat Maturitas	Interval Score
1	Rintisan	$(1,0 \leq \text{score} < 2,0)$
2	Berkembang	$(2,0 \leq \text{score} < 3,0)$
3	Terdefinisi	$(3,0 \leq \text{score} < 4,0)$
4	Terkelola dan Terukur	$(4,0 \leq \text{score} < 4,5)$
5	Optimum	$(\geq 4,5)$

Berdasar surat dari BPKP deputy Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.09.03/LHP-440/PW16/3/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Hasil evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah Level 3 terdefinisi dengan skor 3,067 dengan rincian:

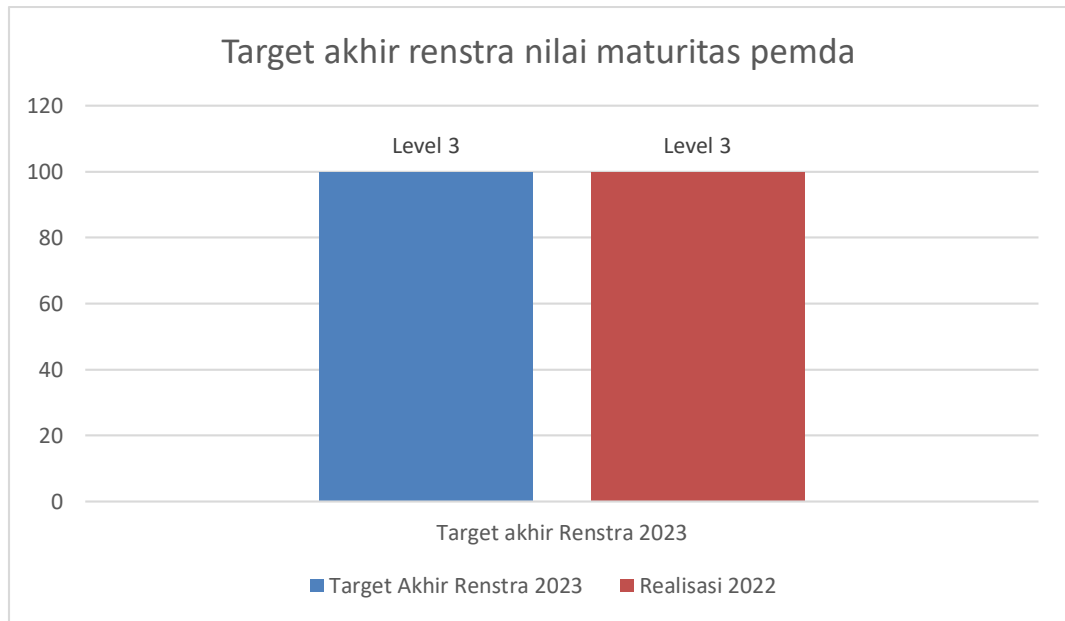
No	Fokus Penilaian	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,733	3,067	(0,666)
2	MRI	3,64	2,80	(0,84)
3	IEPK	3,65	2,77	(0,88)



Dengan terealisasinya nilai maturitas SPIP Kabupaten Tapin Level 3 maka tercapailah target level 3 maturitas Pemda.



Nilai maturitas SPIP Pemda yang dikeluarkan oleh BPKP dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2022 untuk tahun 2022 penilaian SPIP menggunakan format terbaru yaitu SPIP terintegrasi, untuk tahun 2018 nilai maturitas SPIP Pemda mendapatkan score 3,037 sedangkan untuk tahun 2022 mendapatkan nilai 3,067 ada kenaikan sebesar 0,030 (*tahun 2019-2021 tidak dilakukan penilaian maturitas oleh BPKP).



Dibandingkan dengan target akhir Renstra, diproyeksikan indikator akan berhasil tercapai, pada tahun 2022 karena menggunakan format baru SPIP terintegrasi untuk nilai SPIP telah mencapai target level 3 akan tetapi untuk MRI dan IEPK masih berada pada level 2.

Faktor penghambat yang membuat MRI dan IEPK masih berada pada level 2 dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

SPIP

1. Penetapan tujuan

- Indikator sasaran strategis perangkat daerah belum seluruhnya dapat diukur dan berorientasi hasil
- Target perangkat daerah belum mempertimbangkan capaian tahun lalu
- Sasaran organisasi perangkat daerah tidak terkait dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah

2. Struktur dan proses

- Kebijakan dan pembinaan manajemen risiko belum ada
- Komunikasi dan informasi manajemen risiko belum optimal
- Evaluasi secara berkala, formal dan terstruktur belum dilakukan

3. Pencapaian tujuan

- Indikator kinerja *outcome* tidak tepat
- Realisasi kinerja *outcome* tidak didukung data yang handal
- Beberapa aset tanah belum memiliki sertifikat
- Beberapa aset tanah belum memiliki berita acara pinjam pakai



Manajemen Risiko

- Kebijakan manajemen risiko masih berupa draft
- Tindak pengendalian belum efektif
- Belum ada manajemen risiko terkait pencegahan dan pengendalian *fraud*
- Sebagian organisasi perangkat daerah belum mengidentifikasi risiko strategis dan risiko operasional dalam *risk register*

IEPK

- Penilaian dan mitigasi risiko fraud belum dilakukan diseluruh perangkat daerah
- Sosialisasi dan implementasi kebijakan pengendalian korupsi belum dilakukan

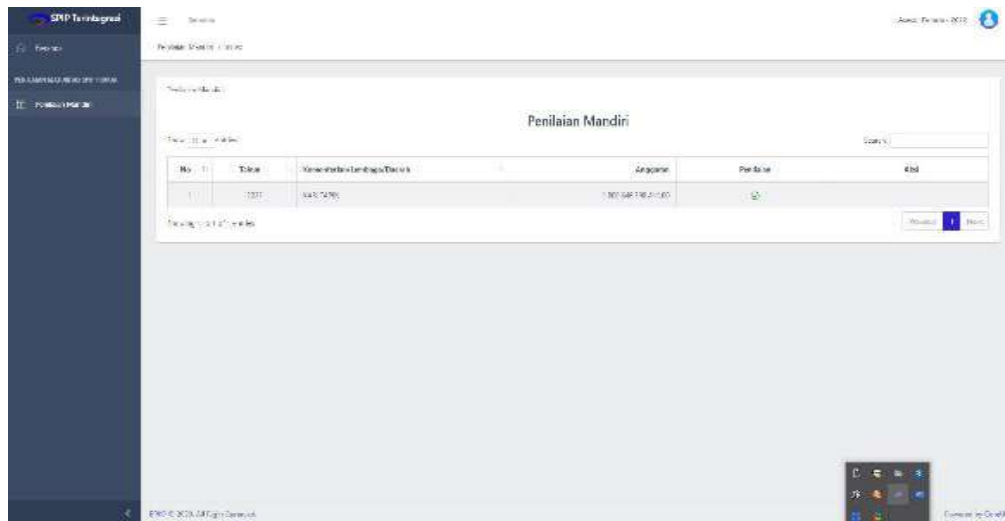
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Memfasilitasi dan mendampingi unit kerja dalam melakukan penyusunan daftar risiko, melaksanakan analisis risiko, dan menyusun rencana pengendalian risiko atau Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja mengenai pentingnya Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Telah menyusun kebijakan manajemen risiko (Perbup No 28 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko) dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian korupsi (Gratifikasi, WBS dan Benturan Kepentingan), Perbup No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan WBS tindak pidana korupsi, Perbup No 46 tahun 2020 tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan, Perbup No 36 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta melakukan sosialisasi *fraud control plan*. Melakukan pengamanan aset daerah melalui tim yang dibentuk oleh BPKAD sertifikasi tanah dan administrasi aset daerah serta melakukan perbaikan indikator dan target kinerja yang SMART.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Kegiatan pendampingan dan asistensi dengan sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Instrumen pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi telah dikembangkan aplikasi E-SPIP terintegrasi oleh BPKP yang digunakan



untuk melaksanakan evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Tapin. (sptintegrasi.bpkp.go.id)



Sumber: sptintegrasi.bpkp.go.id



Sosialisasi kebijakan pengendalian korupsi dan Bimtek SPIP terintegrasi



Bimtek Kapabilitas APiP dan Maturitas SPIP



Secara nasional hasil capaian maturitas SPIP K/L/Pemda tahun 2022 terdapat 30 K/L/Pemda dengan level maturitas level 1, 172 K/L/Pemda dengan level maturitas level 2, 422 K/L/Pemda dengan level maturitas \geq level 3.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 422 K/L/Pemda dengan level maturitas \geq level 3

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dengan peran efektif sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah dalam hal ini BPKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP melalui *Grand Design* peningkatan kapabilitas APIP tahun 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.

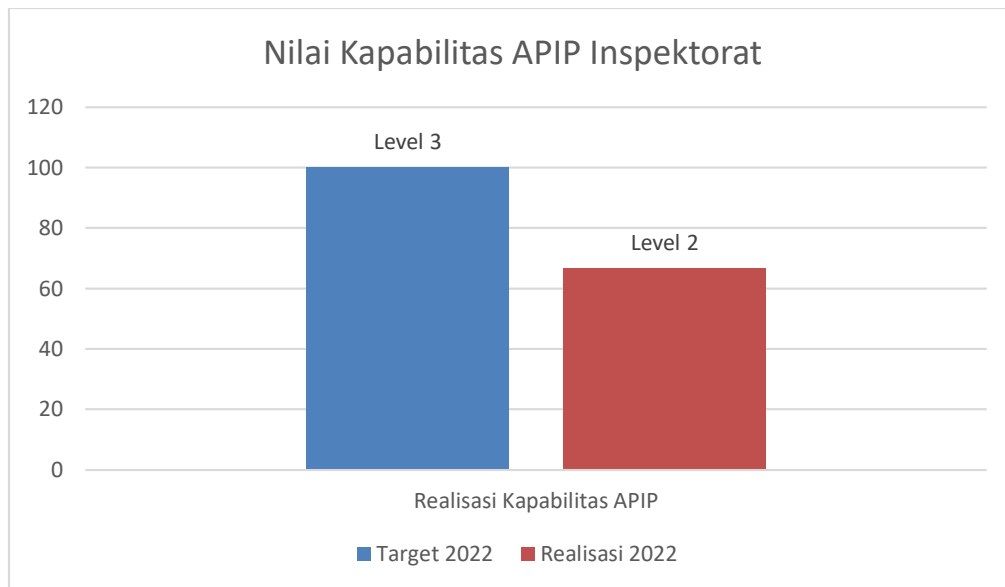
Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Model ini sudah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Berdasarkan laporan Nomor: PE.09.03/LHP-384/PW16/6/2022 Tanggal 2 Desember 2022 dari BPKP hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Tapin berada di Level 2 sebagai berikut:

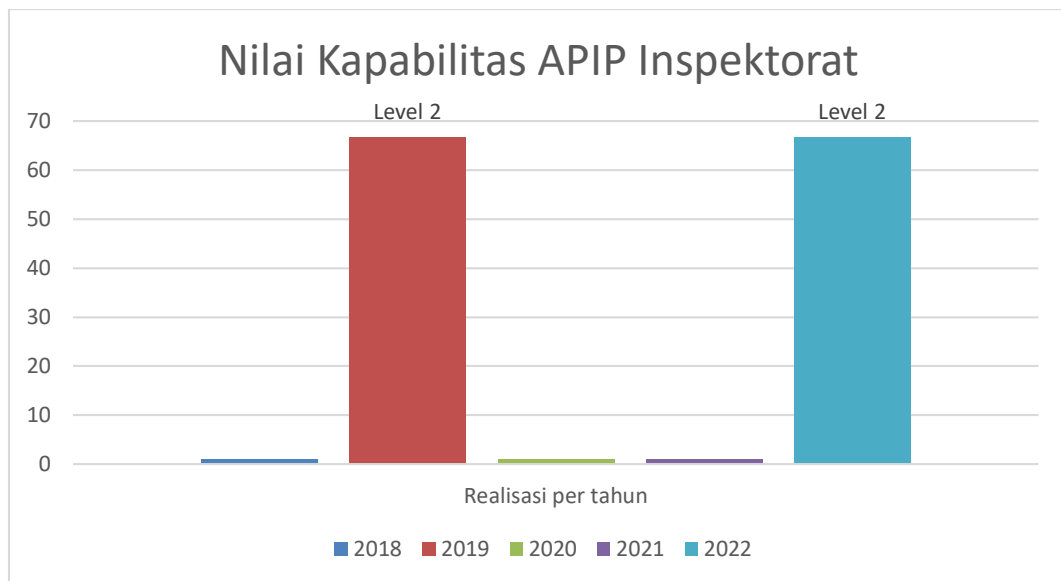
No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan SDM	3	0,54	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54	2	0,45
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36	3	0,36



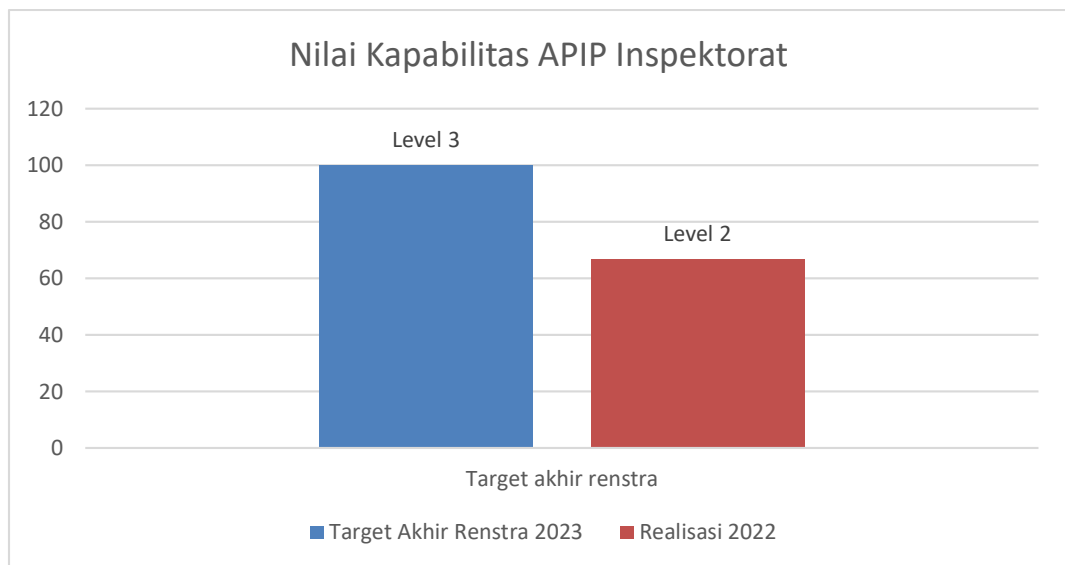
Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan layanan	3	1,20	2	1,00
Simpulan Entitas		3,00	3,00	2,00	2,71



Dari target yang telah ditentukan Level 3 realisasi indikator ini Inspektorat baru mencapai Level 2.



Realisasi tahun 2019 dan 2022 sama-sama berada di Level 2, untuk tahun 2019 masih menggunakan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP Perban BPKP No 16 tahun 2015 sedangkan tahun 2022 sudah menggunakan Perban BPKP No 8 Tahun 2021 tentang penilaian kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda dengan skor 2,71 dengan kenaikan sebesar 0,71. (*tahun 2018,2020,2021 tidak dilakukan penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP).



Dibandingkan dengan target akhir renstra, diproyeksikan indikator akan berhasil tercapai.

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Masih belum idealnya komposisi pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- Masih kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi operasional pengawasan intern
- Kurang optimalnya reviu dan evaluasi kinerja APIP
- Belum optimalnya penyusunan manajemen risiko pada masing-masing entitas pengawasan, sehingga pengawasan berbasis risiko belum optimal terlaksana.
- Belum dilaksanakan kuisioner/ survei kepuasan internal, sehingga belum dilaksanakan evaluasi pelayanan kepegawaian, keuangan, umum dan pelayanan irban secara berkala.
- Kebijakan/ SOP akses penuh terhadap informasi organisasi, belum dimiliki Inspektorat.
- Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak manajemen/*Stakeholder*.
- Rekomendasi sebagai hasil pemberian jasa konsultasi belum didokumentasikan dengan baik.



Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP antara lain sebagai berikut:

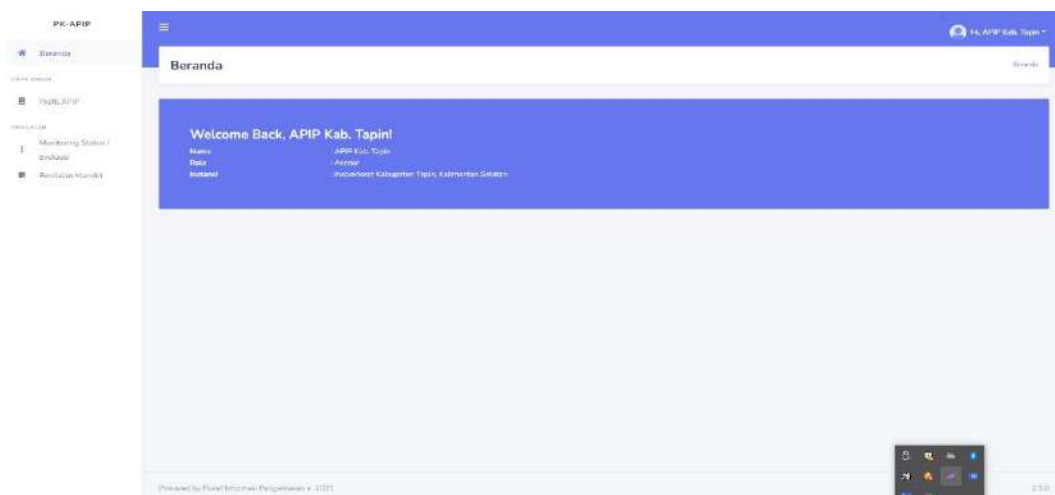
- a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2016 yang dilaksanakan BPKP
- b. Melaksanakan telaahan sejawat berdasarkan Laporan Hasil Telaahan Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Tapin oleh Inspektorat Hulu Sungai Tengah Nomor: 700/091/INSP/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Laporan Hasil Telaahan Sejawat pada Inspektorat Hulu Sungai Selatan Nomor 700/009/TS/TIM/INSP/2019 tanggal 2 April 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Berdasarkan Laporan Hasil Telaahan Sejawat tersebut Inspektorat Kabupaten Tapin mendapatkan nilai 65,97 dengan kategori penilaian Cukup Baik.
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan praktik profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan, peningkatan kapasitas auditor/P2UPD melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi auditor internal baik lingkup provinsi maupun nasional, membangun sistem informasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
- d. Senantiasa mendorong efektifitas pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis pemda dan OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan
- e. Memutakhirkan peta auditan dan register risiko OPD sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan yang dapat mengawal pencapaian tujuan strategis pemda.
- f. Menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* yang telah diidentifikasi.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

Instrumen pendukung penilaian kapabilitas APIP telah dikembangkan aplikasi PK-APIP oleh BPKP yang digunakan untuk melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Tapin. (apip.bpkp.go.id/newpkapip)



Secara nasional rincian kapabilitas APIP Pemkab/kota tahun 2022 terdapat 33 APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas ≤ level 1, 209 APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas level 2 dan 266 APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas ≥ level 3. APIP Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 209 APIP Pemkab/kota dengan kapabilitas level 2



Sumber: apip.bpkp.go.id/newpkapip

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95	85,18	89,66%
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	11	0	0%
		Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	2.3	1.47	63.91%

Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan



untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCP di setiap Pemda dengan Inspektorat sebagai koordinator di setiap daerah.

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah hasil nilai implementasi penguatan upaya anti korupsi pada tata kelola dengan delapan area intervensi dari KPK yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH
	Implementasi SSH
Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB
	Implementasi ASB
Penganggaran APBD	Penyampaian Rancangan KUA PPAS
	Kesepakatan Rancangan KUA PPAS
	Penyerahan RAPBD
	Persetujuan DPRD
	Publikasi APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen
	Ketersediaan SDM UKPBJ
	Ketersediaan fungsional PBJ
Pelaksanaan Tupoksi	Reviu perencanaan PBJ
	<i>Vendor Management System</i>
	Evaluasi Kegiatan PBJ
	Advokasi PBJ
Perangkat Pendukung	Kode Etik PBJ
	SOP PBJ
	TPP Khusus UKPBJ
Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP
Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ

3. Perizinan

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Regulasi	Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang
	Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan
	Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan
Infrastruktur Perizinan	Sistem Perizinan Online Daerah
	Lokasi dan Tempat Layanan
	Media Publikas
Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat



4. Pengawasan APIP

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM
	Ketersediaan Anggaran
	Penilaian Kapabilitas APIP
Kegiatan Pengawasan	Independensi dan Objektivitas APIP
	Penjaminan Kualitas Pengawasan
	Kinerja Rutin Pengawasan
Pengendalian Internal Pemerintah	Pengawasan Prioritas Nasional
	Implementasi Audit Berbasis Risiko
	Evaluasi SPIP
	Tingkat Maturitas SPIP
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Penanganan Pengaduan
	Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>)
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
Kegiatan Pengawasan Lainnya	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)
	Probiti Audit
	Reviu Tata Kelola

5. Manajemen ASN

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Regulasi Manajemen ASN	Perkada Manajemen ASN
	SK Kada Manajemen ASN
Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian
Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi
	Pengendalian Gratifikasi
Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan
	Tambahan Penghasilan Pegawai
	Promosi, Rotasi, Mutasi
	Manajemen Kinerja Individu
	Penilaian Sistem Merit
Pencegahan Jual Beli Jabatan	Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai
	Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN
	Evaluasi Benturan Kepentingan

6. Optimalisasi Pajak Daerah

<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Regulasi Pajak Daerah	Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah
Database Pajak Daerah	Data Potensi Pajak Daerah
	Data Tunggakan Pajak Daerah
Inovasi Peningkatan Pajak	Usulan Inovasi Pajak Daerah
	Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah
Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak Daerah
Pengendalian dan Pengawasan	Pemeriksaan Pajak Daerah
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah

7. Pengelolaan BMD

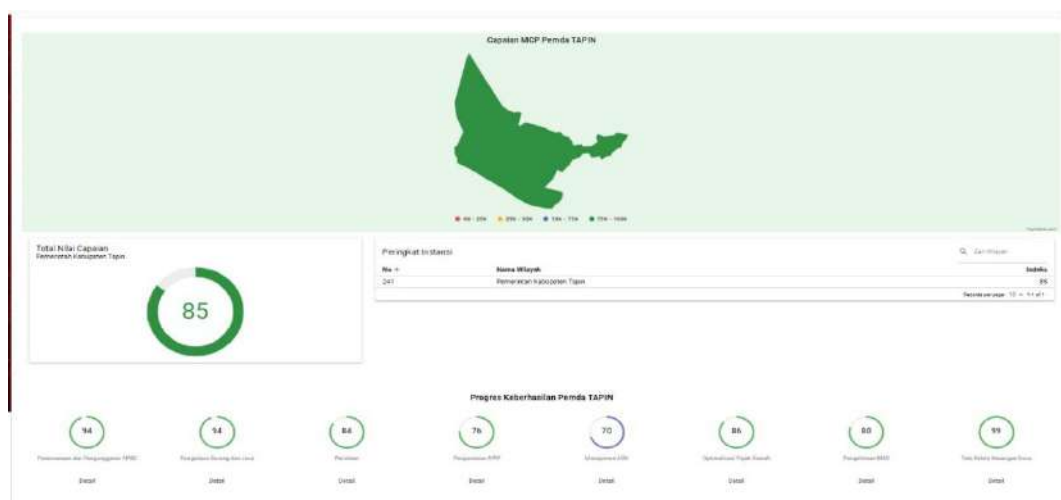
<i>Indikator</i>	<i>SubIndikator</i>
Regulasi BMD	Kelengkapan Regulasi BMD
Penatausahaan BMD	Database BMD
	Rekonsiliasi BMD
	Inventarisasi BMD
Pengamanan Hukum	Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikat BMD
	Legalisasi BMD
Penertiban BMD	Penertiban BMD
Pengendalian dan Pengawasan	Pakta Integritas BMD
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD



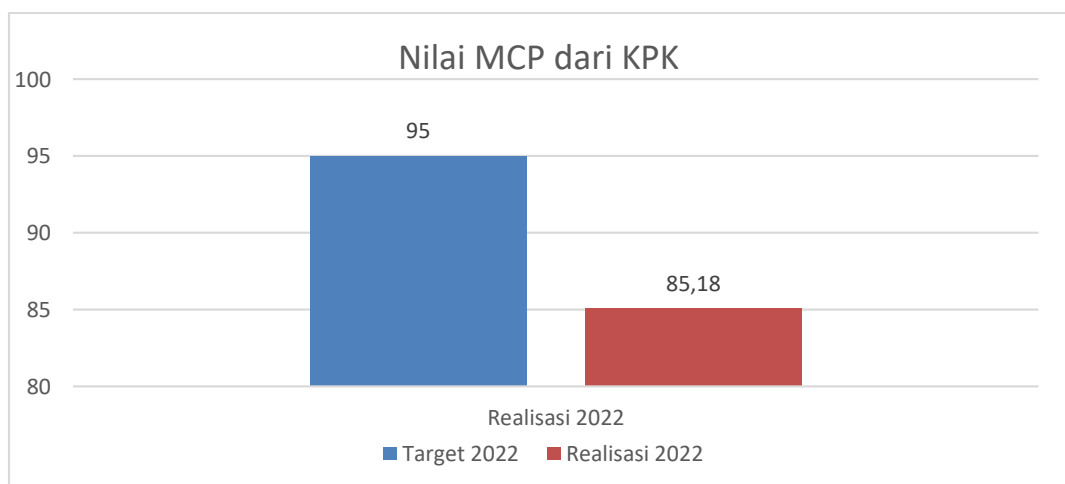
8. Dana Desa

Indikator	SubIndikator
Regulasi	Regulasi Keuangan Desa
Publikasi	Publikasi APBDes
	Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes
Sistem Keuangan Desa	Siskeudes Online
Laporan Konsolidasi	Laporan Konsolidasi APB Desa
Pengawasan	Audit Keuangan Desa
	Database Aset Desa
	Mekanisme Pengawasan Masyarakat

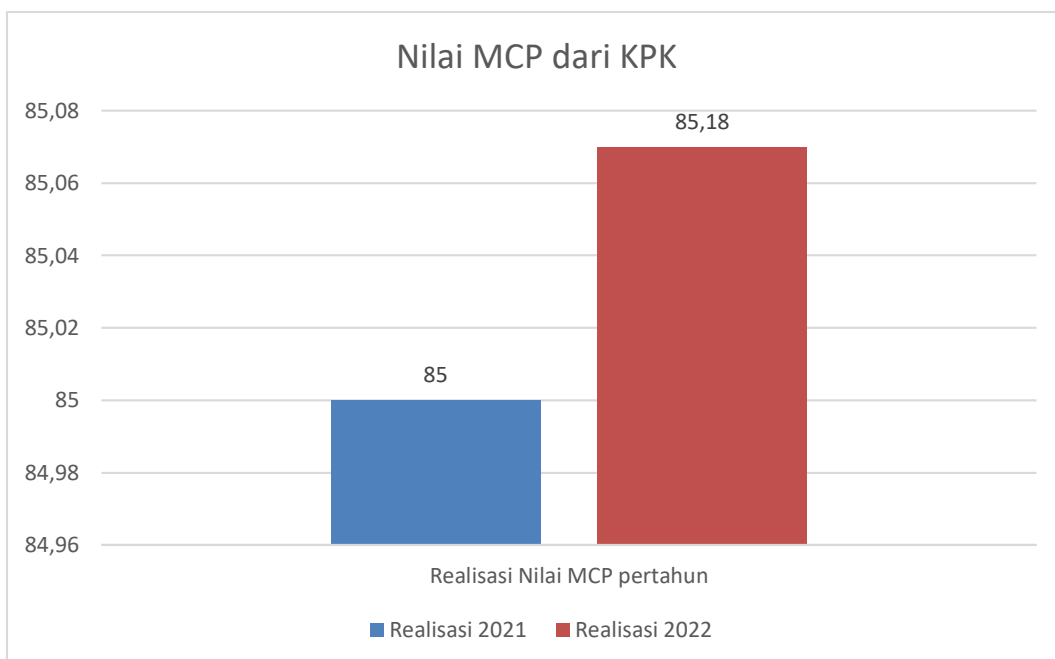
Capaian ini diukur dari implementasi rencana aksi terhadap 8 sektor di atas berdasarkan monitoring Center Prevention (MCP) yang bisa dilihat dari <https://jaga.id/jendela-daerah/program>.



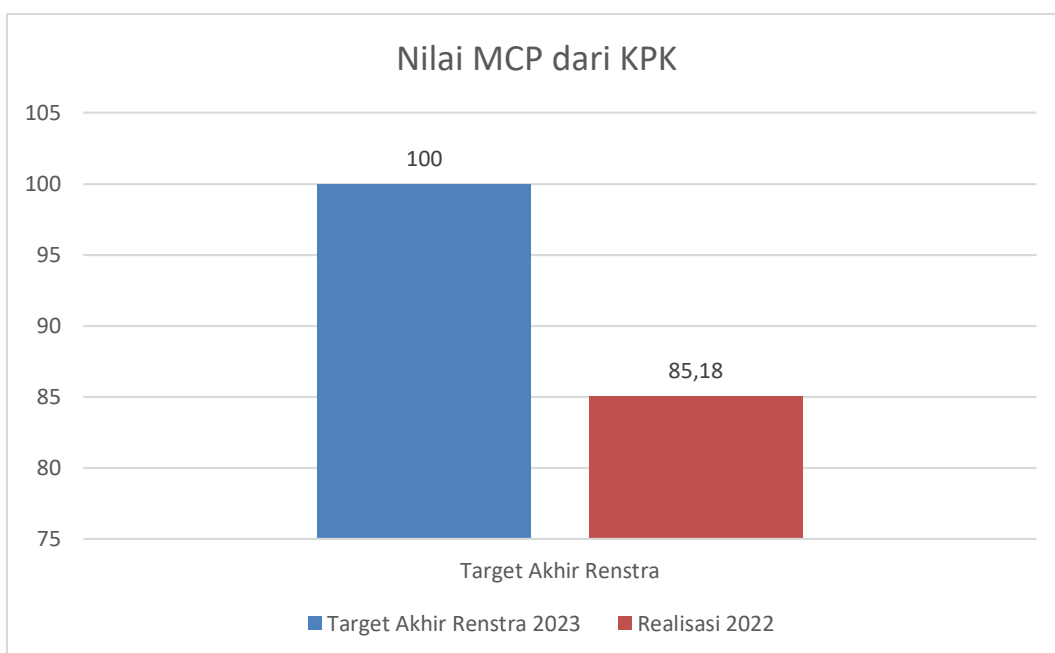
Instrumen pendukung ini adalah sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat.



Dari target yang telah ditentukan sebesar 95 pada tahun 2022 Nilai MCP dari KPK mendapatkan nilai 85,18 dengan capaian realisasi kinerja tinggi



Realisasi tahun 2021 dengan nilai 85 sementara realisasi tahun 2022 sebesar 85,18 ada kenaikan sebesar 0,18 (untuk tahun 2018-2020 tidak dilakukan pengukuran karena indikator baru)



Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2023, diproyeksikan indikator akan berhasil tercapai.

Faktor penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja:

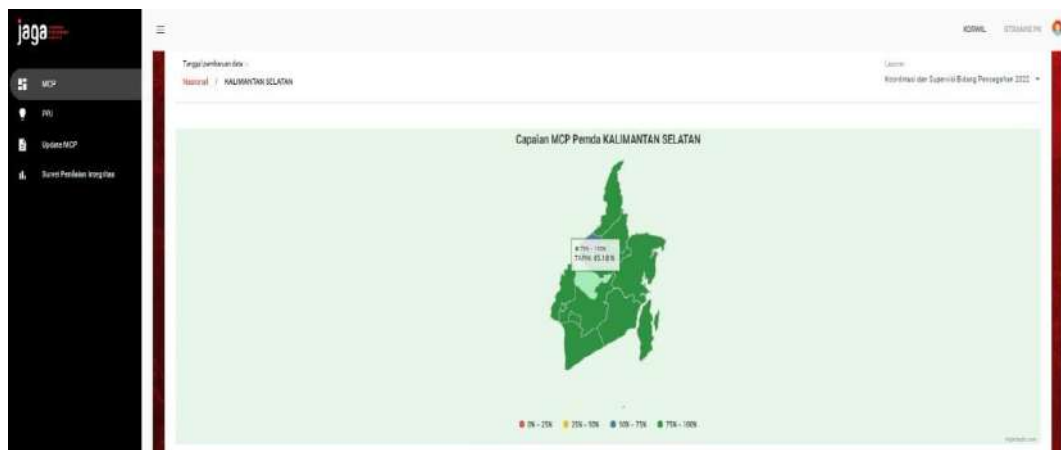
- a. Komitmen bersama pemangku kepentingan dalam upaya memaksimalkan pelaporan MCP KPK
- b. Kurang optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan



Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan Nilai MCP antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong peran pemangku kepentingan terkait penilaian yang menjadi tanggungjawabnya dalam pelaporan MCP KPK
- b. Meningkatkan kualitas verifikasi validasi data yang dimasukkan dalam MCP KPK.
- c. Koordinasi dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terhadap progres pelaporan MCP KPK yang menjadi bagian tanggung jawabnya

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan desa dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.



Berdasarkan hasil penilaian MCP KPK 2022 dari 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat, 1 Kabupaten/Kota dengan capaian MCP 50%-75% dan 12 Kabupaten/Kota dengan capaian MCP 75%-100%.

Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota dengan capaian MCP 75%-100%.



Bimtek pengawasan pengelolaan keudes dan Bimtek Probity Audit

Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

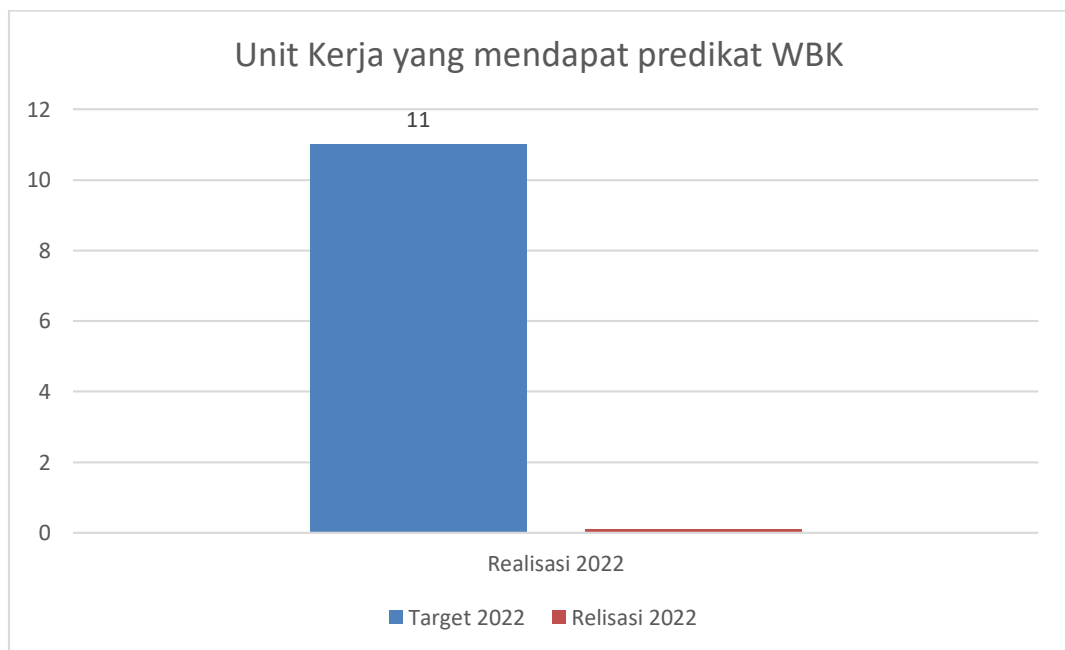
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2022 berdasarkan laporan evaluasi pembangunan ZI ada tiga SKPD yang dilakukan penilaian Zona Integritas yaitu: Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan penilaian Zona Integritas terhadap ketiga SKPD tersebut masing-masing mendapatkan nilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (58,58), Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul (93,88) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (94,65). Berdasarkan pengumuman dari Kementerian PanRB No: B/13/PW.03/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Tindak lanjut hasil seleksi administrasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022 menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dapat melanjutkan ke tahap desk evaluasi. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi tahap kedua Desk Evaluasi Virtual ZI tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul belum berhasil mendapatkan predikat WBK.



Dari 11 unit kerja yang ditargetkan mendapatkan predikat WBK masih belum ada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK



Dari tahun 2021 sejak indikator ini ditetapkan hingga tahun 2022 unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin masih belum berhasil mendapatkan predikat WBK



Dibandingkan dengan target akhir renstra yakni 12 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK, diproyeksikan untuk indikator ini minimal bisa mendapatkan 1 unit kerja mendapatkan predikat WBK di akhir periode Renstra.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Unit kerja yang diusulkan belum cukup memahami definisi dan target kinerja yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan strategi yang dilakukan belum sepenuhnya mendukung unit kerja dalam mencapai kinerja yang lebih baik



- b. Komitmen dalam membangun zona integritas pada unit kerja belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik
- c. Inovasi yang dibangun belum cukup memberikan dampak peningkatan target kinerja yang lebih baik
- d. Unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan SPIP dengan baik yang dapat berdampak negatif terhadap integritas
- e. Implementasi sistem pengawasan hanya bersifat *public campaign* belum dilakukan secara sistematis
- f. Tim penilai internal belum optimal dalam membina dan mengawal ZI

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja:

- a. Mereviu secara berkala target kinerja
- b. Meningkatkan pemerataan internalisasi ZI
- c. Mendorong unit kerja terus menciptakan inovasi
- d. Membangun penerapan manajemen resiko yang baik
- e. Mengimplementasikan penguatan pengawasan disetiap unit kerja
- f. Memperbaiki dan menyusun strategi komunikasi agar pengguna layanan merasakan upaya perbaikan layanan
- g. Menguatkan SDM TPI dalam mengawal pembangunan ZI

Untuk mendukung capaian indikator ini di dukung dengan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.



Pendampingan kepada RSUD Datu Sanggul ke RSJ Sambang Lihum dalam rangka mendapatkan predikat WBK



Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi

Penguatan pengawasan merupakan bagian dari komponen Indeks RB pada area 7 (tujuh). Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini sebagai berikut.

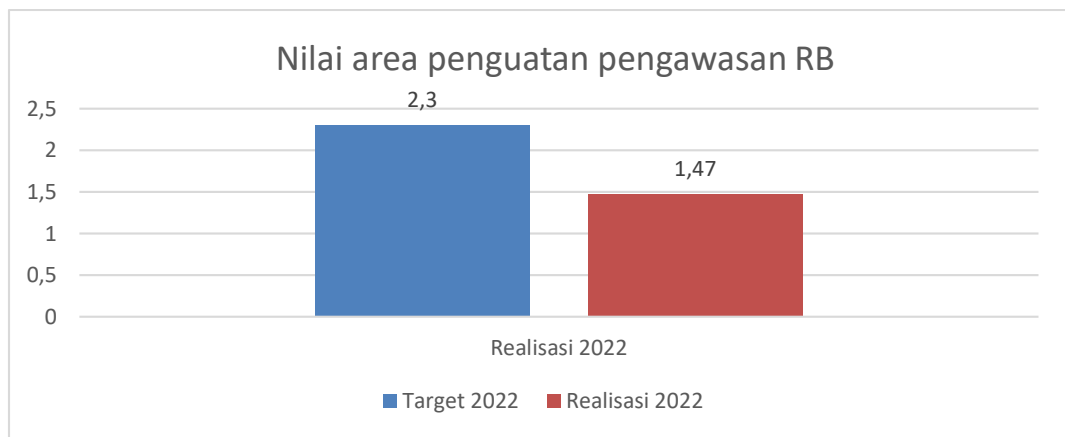
1. Meningkatnya kepatuhan terdapat pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut: Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Whistle Blowing System dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

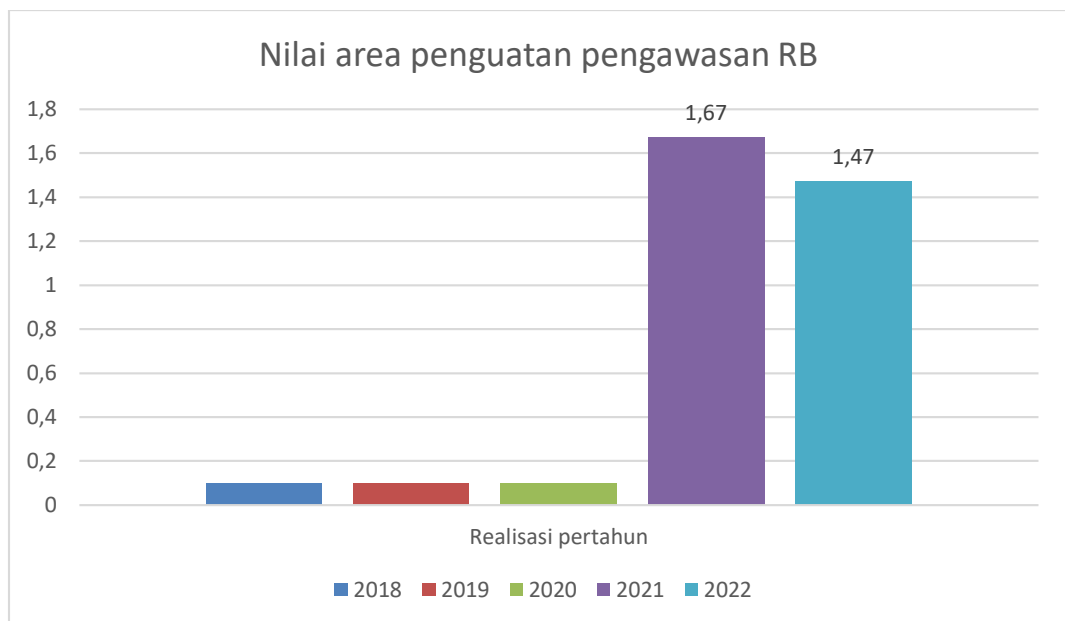
Salah satu peran Inspektorat dalam mengungkit Indeks RB Pemerintah Kabupaten Tapin pada komponen penguatan pengawasan. Komponen ini terdiri dari:

1. Penguatan Pengendalian Gratifikasi
2. Optimalisasi Penerapan SPIP
3. Peningkatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4. Optimalisasi Whistle-Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Mendorong Unit Kerja Menuju WBK/WBBM
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

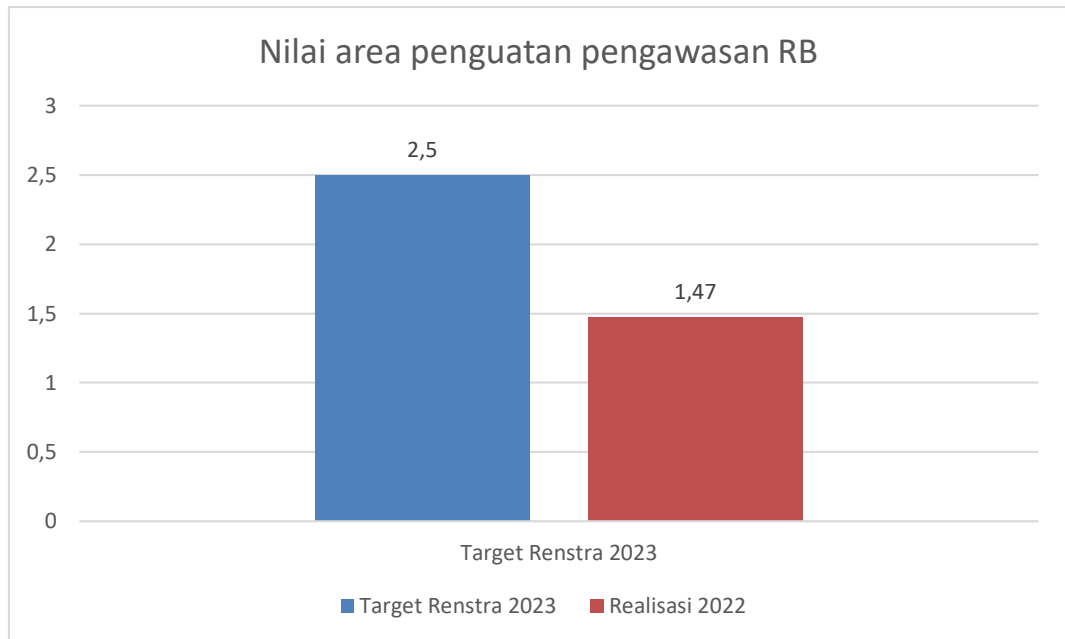
Penguatan pengawasan merupakan bagian dari penilaian Evaluasi reformasi birokrasi yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.



Pada tahun 2022, Inspektorat menargetkan jumlah skor penguatan pengawasan sebesar 2,3, Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin menyebutkan bahwa Skor Penguatan Pengawasan berhasil mencapai skor 1.47. Dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian skor penguatan pengawasan telah mencapai 63.91%.



Indikator Kinerja Skor Penguatan Pengawasan merupakan Indikator Kinerja yang baru mulai diperjanjikan pada tahun 2021, sehingga apabila melihat perkembangan capaian tahun 2021 dengan Skor Penguatan Pengawasan sebesar 1.67, terdapat penurunan sebesar 0,20 menjadi 1,47 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan atas hasil rekapitulasi antara unit kerja pemda dan 10 unit kerja *sample* (ada SKPD baru) sehingga mengakibatkan adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi.



Atas capaian ini, Inspektorat akan terus berusaha mengejar target akhir tahun Renstra 2023 sebesar 2.5.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Belum optimalnya tim RB unit kerja dan kabupaten dalam menjalankan perannya;
- Kemampuan asesori RB unit kerja dan kabupaten masih perlu ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan persepsi antara asesori dengan evaluator dalam evaluasi RB
- Masih belum optimalnya diseluruh jajaran dalam pelaksanaan RB
- Implementasi penguatan pengawasan belum efektif

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam peningkatan skor penguatan pengawasan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan peran dan fungsi tim RB
- Meningkatkan pengetahuan asesori PMPRB dengan narasumber dari Menpan RB
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan gratifikasi dan secara aktif mendorong peran UPG
- Mendorong kesadaran unit kerja dalam penerapan SPIP
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat



f. Membuat kebijakan mengenai Whistle-Blowing System (WBS) dan benturan kepentingan.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan capaian pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.



Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan RB

Kegiatan Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung Inspektorat Kabupaten Tapin dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, inventarisasi lintas sektor Inspektorat adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Inspektorat	Koordinator tindak lanjut Obyek pemeriksaan	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	SKPD	Bagi SKPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi kelompok sasaran: 1. Peningkatan SPIP unit kerja 2. Penurunan peluang pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja
	SKPD di lingkungan Pemda Tapin					
	BPK/APIP		Sebagai pemeriksa atas kegiatan pada Pemda Tapin			



No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
2	Pengawasan umum/teknis	Inspektorat	Melakukan pengawasan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa program kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan saran/rekomendasi atas ketidaksesuaian yang terjadi	Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan	SKPD	Bagi SKPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi kelompok sasaran: 1. Bahan evaluasi kegiatan/kebijakan
		SKPD di lingkungan Pemda Tapin	Sebagai obyek pemeriksaan			
3	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Inspektorat	Koordinator	Tindak lanjut penyelesaian TPTGR	SKPD	Bagi SKPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Bagi kelompok sasaran: 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
		Majelis TPTGR	Pelaksana penyelesaian TPTGR			
		BPK	Pemantauan dan evaluator pelaksanaan TPTGR			
		SKPD di lingkungan Pemda Tapin	Obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TPTGR			
		Masyarakat	Obyek pemantauan selaku pihak yang memiliki TPTGR			
4	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat	Koordinator	Rencana pengawasan tahun selanjutnya	Stakeholder terkait	Bagi SKPD: 1. Sebagai bahan masukan sehingga dalam perencanaan pengawasan akan didapatkan perencanaan yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang tepat, serta tidak tumpang tindih
		BPKP/ itjen kemendagri	Sinkronisasi perencanaan pengawasan			
		Inspektorat Provinsi	Pemberi saran dan masukan serta konsolidasi pengawasan			
5	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat	Tim penilai internal RB dan ZI	Hasil evaluasi Rb dan ZI	SKPD	Bagi SKPD: 1. Mendukung capaian sasaran Pemda: indeks Reformasi Birokrasi
		SKPD di lingkungan Pemda Tapin	Sebagai unit kerja			
		KemenpanRB	Tim penilai nasional			
6	Satuan tugas Saberpungli	Inspektorat	Selaku penyedia dukungan dana untuk kegiatan satgas Saberpungli	Pelayanan publik Pemda Tapin bebas pungli	Unit kerja pemberi layanan publik	Mendukung capaian pemda: Nilai eksternal persepsi korupsi
		Kejaksanaan	Pengarah 4 UPP Satgas Saberpungli dan anggota tim satgas			
		Kepolisian	Pengarah 3, Ketua Pelaksana, sekretariat UPP Satgas Saberpungli dan anggota tim satgas			



No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
7	Unit pengendalian gratifikasi	Inspektorat	Memfasilitasi pelaporan gratifikasi dari ASN/penyelenggara negara di lingkungan Pemda Tapin mulai dari laporan, verifikasi awal, sebelum disampaikan kepada KPK untuk mendapatkan status penetapan status terkait obyek gratifikasi yang dilaorkan	Pelaporan gartifikasi ke KPK	ASN/ penyelenggara negara	Mendukung capaian sasaran Pemda: indeks Reformasi Birokrasi
		ASN/ Penyelenggara negara	Obyek pelaksana kepatuhan atas gratifikasi			
		KPK	Verifikator laporan gratifikasi			

C. Akuntabilitas Keuangan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan pengukuran aspek realisasi anggaran (biaya) sesuai dengan program dan kegiatan per sasaran strategis, dengan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran	% Efisiensi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	100%	59.35%	
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	95.55%		
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	80%		
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	100%		
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	66.66%		
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	89,54%	42.18%	
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	0%		
		Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi	63.91%		
TOTAL			74.46%	50.77%	23.69%

Sisa anggaran sebesar Rp 2.449.545.100,00 bersumber dari belanja operasional harian pemeriksaan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis tercapai 74.64%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp 2.449.545.100,00 atau 23.69%



BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin pada Tahun anggaran 2022. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Interval Nilai Rentang Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan hasil capaian keseluruhan kinerja adalah **74,47%** dengan kategori **Sedang**, Inspektorat Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Ke Dua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 8 target kinerja. Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja dari Dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan rincian terdapat 3 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Baik, 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Tinggi dan 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sedang, 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Rendah, 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Rendah.

2. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan



tahun 2022 ini memang terasa cukup berat dimana pada saat ini Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki jumlah tenaga pengawas yang masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun dari itu semua merupakan suatu tantangan dan menjadi pemicu agar dimasa akan datang kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin akan semakin baik. sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi serta peran Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai *early warning system* atau *alat kendali* yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) bagi penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan dambaan dan harapan kita bersama dapat terwujud.

B. SARAN

1. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja berupa pedoman/ SOP yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, serta perlunya dilakukan review/ evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing unit kerja.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Penetapan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai pengarahan dan pengorganisasian kegiatan agar Penetapan kinerja tidak hanya sebatas untuk pelaporan atau dokumentasi semata serta Menumbuhkan Tata



Kelola data informasi yang berawal dari rasa memiliki dan kepedulian terhadap Dokumen/Arsip Kinerja di setiap jenjang/tingkatan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh satuan kerja/obyek pemeriksaan, aparat pengawas intern maupun dengan aparat pengawas ekstern akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya juga memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang capaian keberhasilannya masih rendah.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* and *punishment*.
8. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas program pembangunan.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Pihak Pertama,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100%
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Minimal BB
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Level 3
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	95
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	11
		Capaian nilai area Penguatan Pengawasan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.3

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

Rp 9.873.620.322,00
 Rp 3.289.162.200,00
 Rp 1.066.714.000,00

Keterangan


 Bupati Tapin,
 Drs. H. M. Arifin Arpan, MM


 Rantau, 17 Januari 2022
 Inspektur Kabupaten
 Unda Absori, SH, MH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19700722 200501 1 013



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN
NOMOR 700/033-SK/INSP/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, perlu dilakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin melalui Penetapan Inspektur Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbarel Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kmbarel Negara Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PANI/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil serta dijadikan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama Tahun 2018-2023, yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapin dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan :
1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
 2. Perencanaan Kinerja Tahunan;
 3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 26 Oktober 2021

INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,



LINDA ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Tapin sebagai Laporan;

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 – 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- KABUPATEN : Tapin
 NAMA SKPD : Inspektorat
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
 FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan
 b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
 f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Opini WTP yang diberikan Audit Eksternal terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	LHP Audit Eksternal	Inspektur
	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materil	Jumlah entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil dibagi jumlah entitas yang diperiksa dikali 100%	LHP Audit Eksternal	Inspektur
	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB	LHE SAKIP MENPANRB	Inspektur
	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP	Inspektur
	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Hasil QA BPKP	Laporan Hasil QA BPKP	Inspektur
Meningkatnya Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Nilai capaian MCP KPK	Hasil Penilaian MCP KPK	Inspektur
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK	Hasil Penilaian TPN MENPANRB	Inspektur
	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Hasil Evaluasi RB Menpan RB	LHE RB MENPANRB	Inspektur



INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN,
 TAPIN
 JUNA ABSORI, SH, MH
 NIP. 19700722 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/ 020/SK/INSP/2022**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Kabupaten Tapin dan terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan dalam implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Inspektur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.
- KEDUA** : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat;
- KETIGA** : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Januari 2022

Inpektur,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
Nip. 19700722 200501 1013

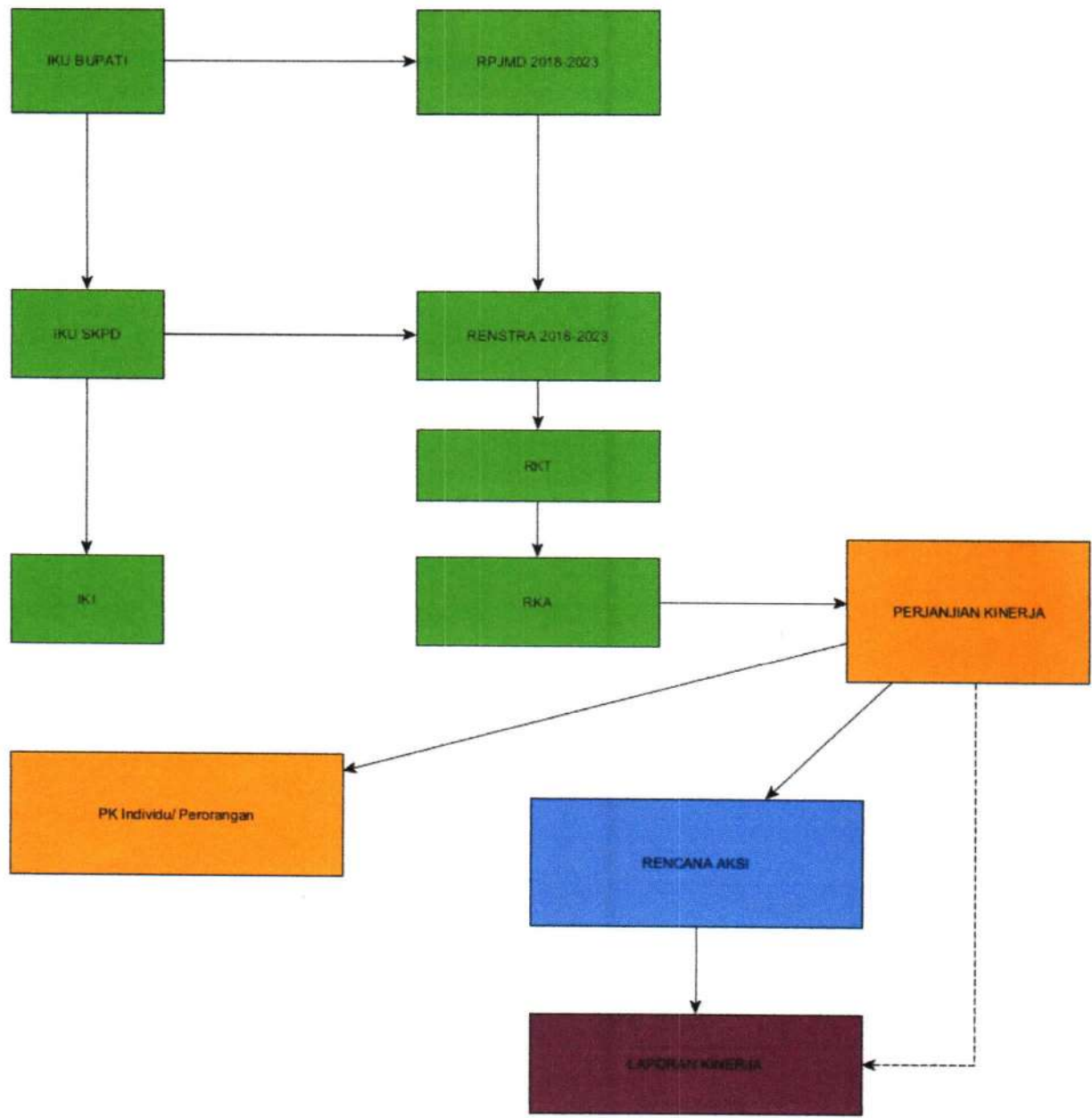
LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR
 KABUPATEN TAPIN
 NOMOR : 020 TAHUN 2022
 TANGGAL : 10 JANUARI 2022

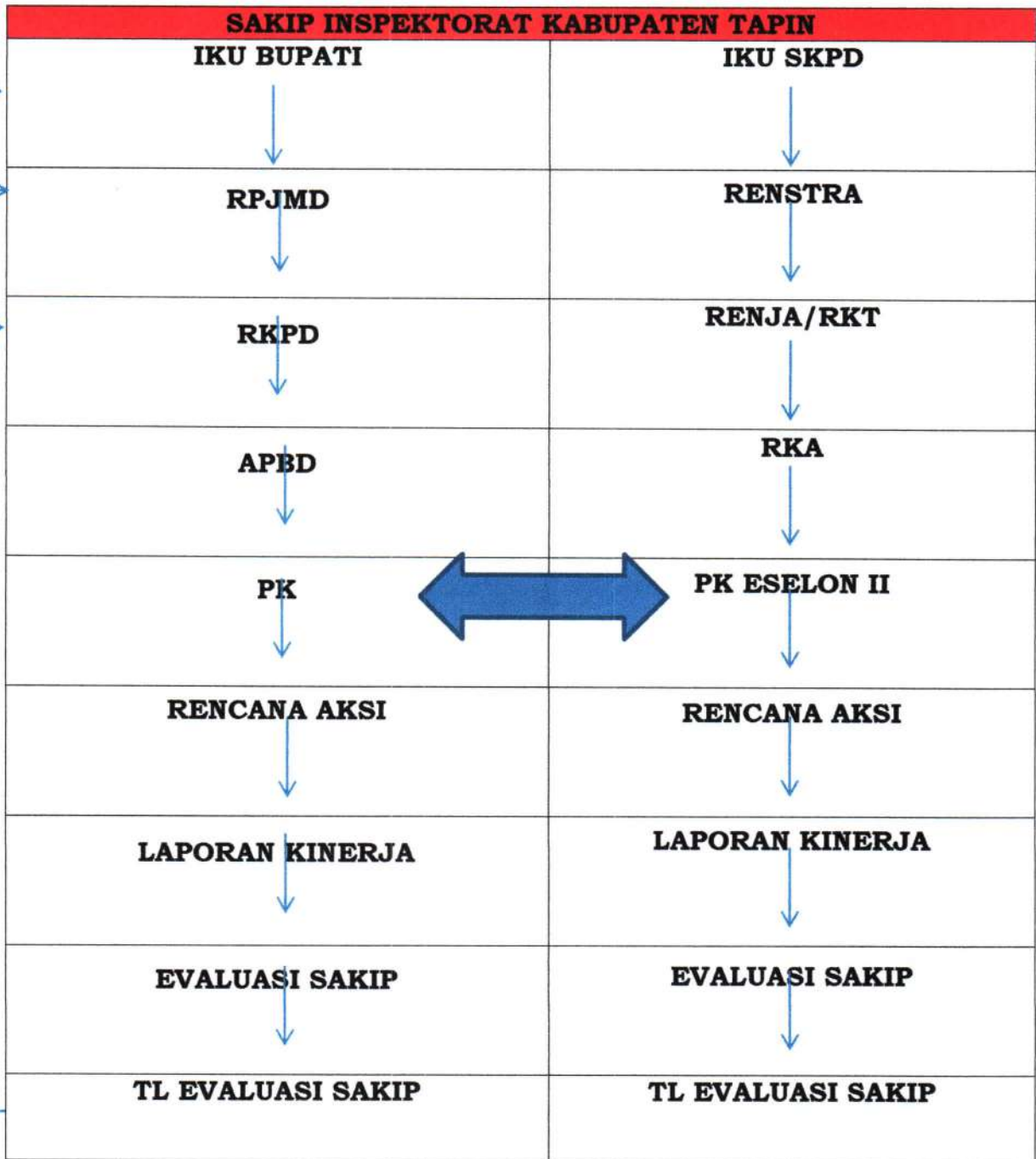
NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Tapin
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Tapin 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Tapin 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Tapin 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Tapin 5. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Tapin 6. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 8. Herliwansyah, SE., MM NIP. 19800110 200803 1 002 9. Palupi Bayu Atmojo, SH., MH NIP. 19810825 200803 1 003 10. Rita Wardati, SE NIP. 19770311 201001 2 008 11. Pahruzaini, SE., MM NIP. 19760806 201101 1 007 12. Rahmatullah, SE., MM NIP. 19770110 201001 1 015 13. Erina Priliawati, SE NIP. 19750414 201001 2 007 14. M, Hernadi Suharsono, SE NIP. 19850305 201503 1 002


Inpektur,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
Nip. 19700722 200501 1013

BAGAN
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN







**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601

RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/REG/092/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022

Tanggal 23 Agustus 2022

**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/Reg/092/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022 Rantau, 23 Agustus 2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2021

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten
Tapin
Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Inspektorat Kabupaten Tapin Sangat Baik (predikat BB) dengan nilai 71,35.. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/coordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai	
	2020`	2021	2020	2021	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	28,35	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	21,88	21,00
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	13,34	10,50
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	6,70	16,75
e.	Capaian Kinerja		20		14,36	
	Nilai Hasil Evaluasi		100	100	84,62	71,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	BB

Inspektorat Kabupaten Tapin telah berupaya terus melakukan perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Namun demikian masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas Implementasi SAKIP , yaitu :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja masih belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik Struktural maupun Fungsional.

2. Pelaporan Kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami rekomendasikan kepada Bapak agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
2. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik Struktural maupun Fungsional.
3. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Kami mengharapkan agar Bapak dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Bapak beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Tapin,



Unda Absori, SH.MH
Pembina Tk.I

NIP.19700722 200501 1 013

Tahun 2022

PK MURNI

OPD/SKPD

SASARAN STRATEGIS

#	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PER TRIWULAN				REALISASI 2022	REALISASI PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah												
1	Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab Tapin	Opini	WTP	NULL	WTP	NULL	NULL	WTP	NULL	WTP	NULL	NULL
2	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materill	Persentase	100	NULL	100	NULL	NULL	92,55	NULL	95,55	NULL	NULL
3	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kab Tapin	Predikat	BB	BB	NULL	NULL	NULL	B	NULL	NULL	NULL	B
4	Nilai Maturitas SPIP Pemda Kab Tapin	Nilai	3	NULL	NULL	NULL	3	3	NULL	NULL	NULL	3
5	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	Nilai	3	NULL	NULL	NULL	3	2	NULL	NULL	NULL	2
Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
1	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Nilai	95	NULL	NULL	NULL	95	85,18	NULL	NULL	NULL	85,18
2	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK	Jumlah OPD	11	NULL	NULL	NULL	11	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Nilai	2,3	NULL	2,3	NULL	NULL	1,47	NULL	1,47	NULL	NULL

- Dashboard
- PERENCANAAN
- RENSTRA
- IKU
- RKT/RENJA
- APBD
- PK
- RENAKSI**
- RENAKSI SKPD
- MONEV RENAKSI
- CASCADING
- LKJIP
- Pegawai
- Laporan
- SKP
- PUSAT BANTUAN

Dev

:Keterangan
Jika sudah di publikasi, Dokumen di atas tidak bisa di **TAMBAH,HAPUS dan EDIT** lagi. Pastikan dokumen di atas sudah di publikasi dengan benar.

Publikasi



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

Rantau, 23 Maret 2022

Nomor : 780/096.1-ADM/INSP
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan I

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural
2. Para P2UPD dan Auditor
3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin

Di –
Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Waktu : 10.00 WITA

Tempat : Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Tapin

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

**Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I
Inspektorat Kabupaten Tapin**

Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I
Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022
Jam : 10.00 WITA s.d. 12.00 WITA
Tempat : Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta : (daftar hadir terlampir)

1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2022.

2. Kesimpulan

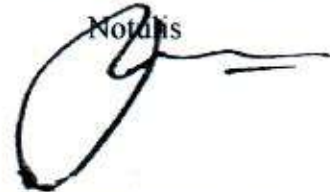
Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b. Capaian kinerja selama Triwulan I TA 2022
- c. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan II

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin

Rantau, 28 Maret 2022

Notulis



Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari	: Senin
Tanggal	: 28 Maret 2022
Pukul	: 10.00 wib
Tempat	: Aula
Acara	: Rapat syonev kinerja ku I

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1.	Unda Absary	Inspektoral	Inspektur	✓		
2.	M. Lotlypi	Inspektoral	Rekrut	✓		
3.	Maya ofa Latief	Inspektoral	Auditor		✓	
4.	HERMAN SYAH	Inspektoral	IPB SN 9	✓		
5.	Annisa Rahmawati	Inspektoral	Auditor		✓	
6.	Fedon, A.	-"-	-"-	✓		
7.	A. Adi Mulya	Inspektoral	basuhay perenanan	✓		
8.	M. Harndis	Inspektoral	Auditor	✓		
9.	M. Ari R.	Inspektoral	Staf	✓		
10.	IDA IRAXAT	-"-	STAF		✓	
11.	Siti Nur Istiqamah	"	Kasubbag U & K		✓	
12.	Ratny F	-"-	Kasubbag Anev		✓	
13.	Rahmatullah	-"-	Auditor	✓		
14.	Erina P	-"-	Auditor		✓	
15.	Ridha Erliani	-"-	PPUPD		✓	
16.	Martunah	-"-	Auditor		✓	
17.	M. Rahim	Inspektoral	Staf	✓		
18.	Eny Lupta Sari	Inspektoral	Auditor		✓	
19.	Feluyi	"	PPUPD	✓		
20.	Hj. Mellos	"	Wan (✓	
21.	Riza P. Dewi	-"-	Auditor		✓	
22.	Hendyulianawati	"	Staf	✓		
23.	Rita Wardohi	-"-	Auditor		✓	
24.	Budi Astono	"	PPUPD	✓		

25.	Nurimadhiyanti	Instansi Tapan	P2 pertama		✓	25.	
26.	Helerangyan	- 11 -	Urban 3	H		26.	
27.	Prakusuma	- 12 -	Auditor	L		27.	
28.	Ennyks	- 13 -	PPURD	P		28.	
29.	Hj. Meliyana	- 14 -	Urban 2	P		29.	
30.	Fitria Andini E	- 15 -	Auditor		P	30.	
31.	Novi Yanti	"	Auditor		P	31.	
32.	Pulso	- 16 -	"	L		32.	
33.	Yanus	- 17 -	PPURD	L		33.	
34.	Permana	- 18 -	Inspektur	L		34.	
35.	Farida Ariyani	- 19 -	PTT		✓	35.	
36.						36.	
37.						37.	
38.						38.	
39.						39.	
40.						40.	
41.						41.	
42.						42.	
43.						43.	
44.						44.	
45.						45.	
46.						46.	
47.						47.	
48.						48.	
49.						49.	
50.						50.	
51.						51.	
52.						52.	
53.						53.	
54.						54.	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

Rantau, 20 Juni 2022

Nomor : 780/038.1-ADM/INSP
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan II

Kepada Yth :

- 1. Para Pejabat Struktural**
- 2. Para P2UPD dan Auditor**
- 3. Para Staf**

Inspektorat Kab Tapin

Di -

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

Waktu : 10.00 WITA

Tempat : Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Inspektur Kabupaten Tapin

Unda Absori, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19700722 200501 1 013

**Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II
Inspektorat Kabupaten Tapin**

Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II
Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Jam : 10.00 WITA s.d. 12.00 WITA
Tempat : Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta : (daftar hadir terlampir)

1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2022.

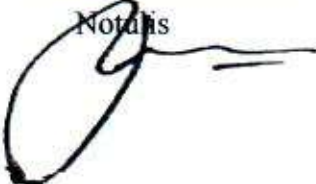
2. Kesimpulan

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b. Capaian kinerja selama Triwulan II TA 2022
- c. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan III

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin

Rantau, 28 Juni 2022

Notulis


Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004








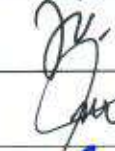




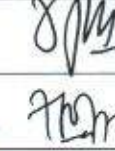



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Juni 2022
Pukul	: 10.00 wtk
Tempat	: Aula
Acara	: Moner kinerja di II

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1.	Unda Absari	Inspektorat	Inspektur	✓		1.
2.	M. Lotkipi	Wisp	Kelcar	✓		2.
3.	A. Edi Jayadi	Inspektorat	Kasubag Perencanaan	✓		3.
4.	Herman Syah	Inspektorat	Wk	✓		4.
5.	IDA IRAWATI	- -	Staf Elap		✓	5.
6.	Maya Olfa Latief	- -	Auditor		✓	6.
7.	Siti Nur Istiqamah	"	Kasubag U&K		✓	7.
8.	Fadha A.	"	Auditor	✓		8.
9.	Erilia P	- -	Auditor		✓	9.
10.	Euy Lupita Sari	"	Auditor		✓	10.
11.	Ratny F	"	Kasubag Anev		✓	11.
12.	M. Ari R	Inspektorat	Staf	✓		12.
13.	Rahmatullah	- -	Auditor	✓		13.
14.	Ridha Erliani	- -	PPUPD		✓	14.
15.	Marfuah	- -	Auditor		✓	15.
16.	M. Harun S	"	Auditor	✓		16.
17.	Annisa Rahmawati	Inspektorat	Auditor		✓	17.
18.	Pahuyi	"	PPUPD		✓	18.
19.	Riza P. Dewi	- -	Auditor			19.
20.	Headly Juliana	"	Staf	✓		20.
21.	Rita Wardani	- -	Auditor		✓	21.
22.	Kj. Mela S	- -	IRBM I		✓	22.
23.	Prudi Astoro	"	PPUPD	✓		23.
24.	Noor aidi fandi	"	"		✓	24.

25.	M. Rahim	Inspektoral	Staf	✓		25.	
26.	Haderansyah	- - -	Irban 3	L		26.	
27.	Pradiazam	- - -	Auditor	L		27.	
28.	Enny Is	- - -	PPUPD		✓	28.	
29.	H. Mulyana	- - -	Irban 2			29.	
30.	Roko	- - -	Auditor	L		30.	
31.	Yenus	"	PPUPD	L		31.	
32.	Azizali	- - -	PTT		✓	32.	
33.	Dewi Tri Wartha	"	PTT		✓	33.	
34.	Nave Yanti	"	Auditor		✓	34.	
35.	Fitria Andini E	Inspektoral	Auditor		P	35.	
36.	Pradiazam	- - -	- - -	L		36.	
37.						37.	
38.						38.	
39.						39.	
40.						40.	
41.						41.	
42.						42.	
43.						43.	
44.						44.	
45.						45.	
46.						46.	
47.						47.	
48.						48.	
49.						49.	
50.						50.	
51.						51.	
52.						52.	
53.						53.	
54.						54.	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

Rantau, 26 September 2022

Nomor : 780/ 439-I -ADM/INSP
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan III

Kepada Yth :

- 1. Para Pejabat Struktural**
- 2. Para P2UPD dan Auditor**
- 3. Para Staf**

Inspektorat Kab Tapin

Di –

Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022

Waktu : 10.00 WITA

Tempat : Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. **Inspektur Kabupaten Tapin**

Sekretaris

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19780304 199612 1 001

**Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III
Inspektorat Kabupaten Tapin**

Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III
Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 10.00 WITA s.d. 12.00 WITA
Tempat : Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta : (daftar hadir terlampir)

1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2022.

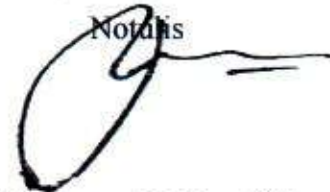
2. Kesimpulan

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b. Capaian kinerja selama Triwulan III TA 2022
- c. Diskusi terkait rencana untuk Triwulan IV

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin

Rantau, 29 September 2022

Notulis


Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004





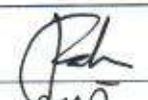
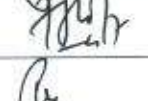




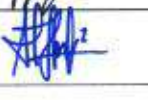


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari	: Rabu
Tanggal	: 28 Sept 2022
Pukul	: 10.00
Tempat	: Aula Inspektorat
Acara	: Rapat Review Evaluasi Kinerja tur III

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1.	M. Ari. R	Inspektorat	Staf	✓		1.
2.	Ky. Mella. S	INSPEKTORAT	IPBAN 1		✓	2.
3.	M. Lotupri	lusp	pelar	L		3.
4.	IDA IRANANTI	-II-	staf elap		✓	4.
5.	Ratny F	-II-	Kepala subag Evaluasi Pelaporan			5.
6.	D. Edi Jayati	Inspektorat	Kasubag perencanaan	✓		6.
7.	Herman syah	Inspekt.	Irban 4	✓		7.
8.	Maya olfa Latief	Inspektorat	Auditor		✓	8.
9.	Annisa Rahmawati	Inspektorat	Auditor		P	9.
10.	Siti Nur Istiqamah	Inspektorat	Kasubag UKK		✓	10.
11.	Rahmawati	-II-	Auditor	L		11.
12.	Eriska P	-II-	Auditor		✓	12.
13.	Ridha Erliani	-II-	PPUPD		✓	13.
14.	Eny Lupita Sari	-II-	Auditor		✓	14.
15.	Marwah	-II-	-II-		✓	15.
16.	Fadri. A.	-II-	-II-	L		16.
17.	Riza P. Dewi	-II-	Auditor			17.
18.	Palyi	-II-	PPUPD	✓		18.
19.	Handy yulianan	-II-	staf	✓		19.
20.	Rita wardah	-II-	Auditor		✓	20.
21.	Budi Astoro	-II-	PPUPD	✓		21.
22.	Noor mali yauki	-II-	-II-		✓	22.
23.	Hakaransyah	-II-	Irban 3	L		23.
24.	EnnyFS	-II-	PPUPD		P	24.

25.	Pratiprati	Inspektoral	Auditor	L		25.	
26.	Fitria Andini E	-11-	Auditor		P	26.	
27.	M. Rahim	Inspektoral	Staf	✓		27.	
28.	H. Mullyana	-11-	Inspektoral 2			28.	
29.	Novi Yandi	"	Auditor		P	29.	
30.	Fdu	~	~	L		30.	
31.	Yunus	"	PPUPD	L		31.	
32.	Purnomo	-11-	Auditor	L		32.	
33.	Azizah	~	PTT		✓	33.	
34.						34.	
35.						35.	
36.						36.	
37.						37.	
38.						38.	
39.						39.	
40.						40.	
41.						41.	
42.						42.	
43.						43.	
44.						44.	
45.						45.	
46.						46.	
47.						47.	
48.						48.	
49.						49.	
50.						50.	
51.						51.	
52.						52.	
53.						53.	
54.						54.	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax. 31601
RANTAU

Rantau, 26 Desember 2022

Nomor : 780/539 -ADM/INSP
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan IV

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural
2. Para P2UPD dan Auditor
3. Para Staf

Inspektorat Kab Tapin

Di –
Tempat

Dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jum`at, 30 Desember 2022

Waktu : 08.30 WITA

Tempat : Aula Inspektorat Kabupaten Tapin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Inspektur Kabupaten Tapin

Unda Absorj, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19700722 200501 1 013

**Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV
Inspektorat Kabupaten Tapin**

Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV
Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022
Jam : 08.30 WITA s.d. 11.00 WITA
Tempat : Aula Inspektorat Kab Tapin
Peserta : (daftar hadir terlampir)

1. Pembahasan

Rapat monitoring dan evaluasi kinerja ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022.

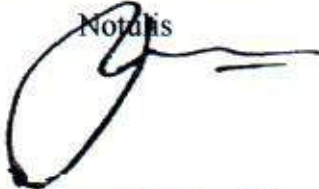
2. Kesimpulan

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b. Capaian kinerja selama Triwulan IV TA 2022
- c. Diskusi terkait rencana untuk TA 2023

Demikian notulen Rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Tapin

Rantau, 30 Desember 2022

Notulis


Muhammad Rahim, SE
NIP. 19891213 201903 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari	: Senin
Tanggal	: 30 des 2022
Pukul	: 08.30 wita
Tempat	: Aula Insp
Acara	: Rapat Moner Bersama Fu W

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
				L	P	
1.	Uda Absari	Inspektorat	Inspektur	✓		1.
2.	M. Lotuliyi	lurp	Sekretaris	✓		2.
3.	A. Edi Syah	Inspektorat	Kasubbag Perencanaan	✓		3.
4.	IDA IRAYATI	- -	STAF EUAP		✓	4.
5.	HERMAN SYAH	INSPEKTORAT	IPB DAN F	✓		5.
6.	Fadri, A	- -	- -	✓		6.
7.	M. Rahim	Inspektorat	Staf	✓		7.
8.	Ratny F	- -	Kasubbag euap		✓	8.
9.	Ridha Erhain	- -	PPUPD		✓	9.
10.	Erina P	- -	Auditor		✓	10.
11.	Emy Lupita Sari	"	Auditor		✓	11.
12.	Siti Nur Istiqamah	"	Kasubbag U&K		✓	12.
13.	Rahmatullah	- -	Auditor	✓		13.
14.	Annisa Pahmawati	- -	- -		P	14.
15.	Marfuah	- -	- -		P	15.
16.	Pito wordah	- -	Auditor		✓	16.
17.	Riza P. Dewi	- -	Auditor			17.
18.	Maya Olfa Latief	- -	Auditor		✓	18.
19.	Pahy	"	PPUPD	✓		19.
20.	Hardy yulianan	"	Staf	✓		20.
21.	M. Harraqlis	"	Auditor	✓		21.
22.	Hj. Mella Sitwanli	"	IPB DAN I		✓	22.
23.	Bude Astono	- -	PPUPD	✓		23.
24.	M. Ari. R	Inspektorat	Staf	✓		24.

25.	Noormatiyanti	Inspektur Telpin	P2 perboma		✓	25.	
26.	Haberansyah	- -	Irwan 3	J		26.	
27.	AAHRUZALMI	- -	Auditor	L		27.	
28.	EnnyFS	- -	PPUPD		P	28.	
29.	H.Muliyana	- -	Irwan 2		8	29.	
30.	Nove Yanti		Auditor		P	30.	
31.	Jennyus		PPUPD	L		31.	
32.	Rdw	~	~	L		32.	
33.	Fitria Andini	Inspekturat	Auditor		P	33.	
34.	Purnama	- -	- -	L		34.	
35.	Dewi tri Wati	~	PTT		P	35.	
36.						36.	
37.						37.	
38.						38.	
39.						39.	
40.						40.	
41.						41.	
42.						42.	
43.						43.	
44.						44.	
45.						45.	
46.						46.	
47.						47.	
48.						48.	
49.						49.	
50.						50.	
51.						51.	
52.						52.	
53.						53.	
54.						54.	

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin		WTP			WTP	
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil		95,55			100%	
		Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	B				Minimal BB	
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin				Level 3	Level 3	
		Nilai Kapabilitas APIP Inspektoral				Level 2	Level 3	
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK				85,18	95	
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK				0	11	
		Capaian nilai area Penguatan Pengawasan Penilaian Reformasi Birokrasi				1,47	2,3	

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB			BB		BB	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai kebijakan pengawasan	Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko	100%				100%	
3	Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten	Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektorat Kabupaten Tapin	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya Penilaian mandiri Kapabilitas APIP	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3			Level 3		Level 3	

Sekretaris



Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin



Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304.199612.1.001

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722.200501.1.013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I				37.5%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I			100%		100%	
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I					100%	
4	Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I					100%	
5	Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu Tata Kelola Pajak Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Inspektur Pembantu Wilayah I



Hj. Miella Siswanti, ST, MT
Pembina
NIP. 19830411 201001 2 027

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II				29,62%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II			100%		100%	
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II					100%	
4	Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II					100%	
5	Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Tata Kelola PBJ, Reviu KUAPPAS, Reviu Manajemen ASN, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Inspektur Pembantu Wilayah II



Hj. Mulyana, S.Sos, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 19681215 198803 2 004

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III				75%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sakin skpd minimal BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III			66,66%		100%	
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III					100%	
4	Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III					100%	
5	Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu RKPD, Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu ASB, HSPK, Monev BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Monev Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Inspektur Pembantu Wilayah III



Haderansyah, SH, MM
Pembina
NIP. 19730503 200501 1 013

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin




Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV				57.14%	100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase predikat sikip skpd minimal BB di Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV			66.66%		100%	
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV					100%	
4	Meningkatnya penerapan SPIP SKPD	Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV					100%	
5	Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Money BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Money Dana Desa serta Aset Desa)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu SSH, Reviu Tata Kelola BMD Money BOS dan Tata Kelola Keuangan Desa, Money Dana Desa serta Aset Desa	100%	100%	100%	100%	100%	

Inspektur Pembantu Wilayah IV



H. Hermansyah, S.Hut, MMA
Pembina Tk. I
NIP. 19700923-199703 1 005

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Investigasi				77.77%	100%	
2	Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu HPS dan Probity Audit)	Persentase capaian Area Intervensi Reviu HPS dan Probity Audit	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD	Jumlah SKPD yang disuikan predikat WBK hingga TPN				1 SKPD	3 SKPD	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD	Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti					100%	
5	Meningkatnya nilai penguatan pengawasan reformasi birokrasi	Persentase capaian area penguatan pengawasan		59%			100%	
6	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi	Persentase hasil evaluasi area pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti			77.77%		100%	

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten Tapin

Inspektur Pembantu Investigasi



Shinta Mayana, S.Pi, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19760524 200003 2 002



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN SUBBAG ANALISA DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan	Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	

Kasubag Analisa dan Evaluasi



Ratry Fitriana, S.IP
Penata
NIP. 19940313 201609 2 002

Rantau, 31 Desember 2022
Sekretaris



Drs. Mohammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN SUBBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan	Persentase indikator kinerja yang smart dan selaras	100%				100%	
		Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin				71,35	Minimal 70	

Kasubag Perencanaan



Akhmad Edi Jayadi, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850928 201001 1 013

Rantau, 31 Desember 2022
Sekretaris



Drs. Mubammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN SUBBAG ADM UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%				100%	
3	Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai standar	Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu	100%				100%	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks kepuasan pelayanan				80,3	80	
5	Meningkatnya Jumlah pernyataan Self assesment Kapabilitas APIP yang terisi	Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat			100%		100%	

Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan



Siti Nur Istiqamah S, SE
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

Rantau, 31 Desember 2022
Sekretaris



Drs. Mshammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN AUDITOR IRBAN WIL I,II,III dan IV KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Terlaksananya PKPT	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentas Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

Auditor Pertama



Marfuah, S.Ak
Penata Muda (III.a)
NIP. 19951031 201903 2 002

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten



Wanda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN P2UPD IRBAN WIL I,II,III dan IV INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Terlaksananya PKPT	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentas Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

Pengawas Pemerintahan Madya

Herliwansyah, S.E., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 19800110 200803 1 002

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten

Wanda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN AUDITOR IRBAN WIL INVESTIGASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Terlaksananya PKPT	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku Persentas Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

Auditor Muda

Rinto Purnomo, S.E
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19830516 201001 1 010

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten

Uarda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN P2UPD IRBAN WIL INVESTIGASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Terlaksananya PKPT	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku Persentas Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

Pengawas Pemerintahan Madya



Yunus, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19650504 198703 1 021

Rantau, 31 Desember 2022
Inspektur Kabupaten



Ulfah Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670722 200501 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN STAF BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP, GU, TU, dan LS) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar	Persentase jumlah SP2D yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU dengan cara menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk (Bank Kalsel) untuk memindahbukukan dana dari Kas Daerah ke rekening Kalsel	Persentase jumlah SP2D yang disampaikan dan diproses oleh Bank Kalsel	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU dengan cara mengajukan Surat Pemindah Bukuan (Pinbuk) ke Bank	Persentase jumlah Surat Pinbuk yang disampaikan ke Bank Kalsel	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran untuk selanjutnya dicatat pada Buku Kas Umum	Persentase jumlah dokumen pembayaran yang baik dan benar yang dicatat pada BKU	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Membuat Laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik	Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah bukti potong dan bukti setor pajak	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Memeriksa kas secara periodik	Persentase jumlah berita acara pemeriksaan kas	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Mendokumentasikan seluruh dokumen keuangan dalam bentuk fisik maupun digital	Persentase jumlah arsip dokumen keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	

Staf bagian Administrasi Umum dan Keuangan



Isfandiar Haidie
Pengatur Tk. I
NIP. 19850916 200604 1 003

Rantau, 31 Desember 2022
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan



Siti Nur Istiqamah S, SE
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN STAF BAGIAN PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Tersedianya bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran	Persentase bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran tepat waktu	100%		100%		100%	
2	Tersedianya bahan konten dokumen informasi publik Inspektorat	Persentase bahan konten dokumen informasi publik yang ditayangkan di website Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat	Persentase bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat yang valid	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Persentase tersedianya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai standar	100%				100%	

Staf bagian Perencanaan



Muhammad Rahim, SE
Penata Muda
NIP. 19891213 201903 1 004

Rantau, 31 Desember 2022
Kasubag Perencanaan



Akhmad Edi Jayadi, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850928 201001 1 013

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN STAF BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

NAMA SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA/KINERJA INDIVIDU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TARGET 2022	KETERANGAN
1	Tersedianya bahan kegiatan dan laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase ketersediaan bahan kegiatan dan laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersedianya bahan penyusunan ihtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	Persentase rekapitulasi laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Persentase ketersediaan bahan kertas kerja penyusunan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis	100%				100%	

Staf bagian Analisa dan Evaluasi



Ida Irawati, SE
Penata Muda
NIP. 19790707 200604 2 012

Rantau, 31 Desember 2022
Kasubag Analisa dan Evaluasi



Ratry Fitriana, S.IP
Penata
NIP. 19940313 201609 2 002